

PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PILKADA DI KABUPATEN BIMA



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh gelar Sarjana
Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

Iwan Setiawan

10538293014

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Iwan Setiawan, 10538293014** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 191 Tahun 1442 H/2020 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020.

16 Rabiul Awal 1442 H
Makassar, -----
02 November 2020 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag (.....)
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd (.....)
Penguji
1 Sudarsono, S.Pd., M. Pd (.....)
2 Dr.H. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum (.....)
3 Dr. H. Muhlis Madani, M. Si (.....)
4 Andi Adam, S.Pd., M. Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif Sosial Dalam Pilkada Kabupaten Bima

Nama : **Iwan Setiawan**

NIM : **10538293014**

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Rabiul Awal 1442 H

Makassar, -----

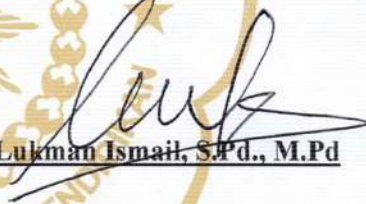
02 November 2020 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhlis Madani, M. Si


Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Des. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : **IWAN SETIAWAN**
Nim : 10538293014
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Judul Skripsi : **Perspektif Sosial Dalam Pilkada Di Desa Sangiang
Kabupaten Bima**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan

IWAN SETIAWAN
10538293014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Nama : **IWAN SETIAWAN**
Nim : 10538293014
Program Studi : Pendidikan Matematika
Judul Skripsi : **Perspektif Sosial Dalam Pilkada Di Desa Sangiang
Kabupaten Bima**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya yang menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini saya selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penciplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apa bila saya melanggar perjanjian saya seperti butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang ada.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, Oktober 2020

Yang Membuat Perjanjian

IWAN SETIAWAN
10538293014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup adalah sebuah perjuangan,

Keberhasilan adalah keberlanjutan,

Dan cita-cita adalah keabadian.

Kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua terhebatku yang tak kenal lelah selama ini atas
perjuangan dan jasanya, Saudara-saudaraku,
Sahabatku, dan untuk seseorang yang tak hentinya mendorong dan
memberikan semangat
dengan keikhlasan dalam mendukung penulis
Mewujudkan mimpi-mimpi menjadi sebuah kenyataan.

ABSTRAK

Iwan Setiawan. 2019. *Perspektif Sosial Dalam Pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima*, Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Dr. H. Muhlis Madani, M.Si dan Lukman Ismail, S.Pd.,M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perspektif sosial terhadap pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima, untuk mengetahui dampak pilkada terhadap perspektif sosial di Desa Sangiang Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang perspektif sosial dalam pilkada dan dampak pilkada. Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik informan yang ditetapkan yaitu pemerintah desa, tokoh pemuda, dan masyarakat desa sangiang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, waktu dan sumber.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini dari aspek bentuk perspektif sosial terhadap pilkada Desa Sangiang Kabupaten Bima pertama, terjadinya demokrasi yang diberikan langsung melalui rakyat atas kebebasan dan keterbukaan untuk memilih dan dipilih dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat, kedua, dinamika politik terjadi dengan adanya kontestasi politik sehingga menimbulkan persaingan kelompok yang semakin nampak selama proses pilkada usai ditengah kondisi sosial masyarakat. Dampak pilkada di Desa Sangiang terjadi yakni dampak positif dan negatif, dampak positifnya ialah mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi aktif dan bertambahnya solidaritas internal dalam kelompok masyarakat, kemudian dampak negatif terjadinya money politic yang sebagian masyarakat sentimen dengan aktivitas dan terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga.

Kata kunci : Perspektif Sosial, Pilkada

ABSTRACT

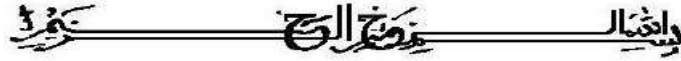
Iwan Setiawan . 2019. *Social Perspective in Regional Elections in Sangiang Village, Bima Regency* , Thesis. Sociology Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor Dr. H. Muhlis Madani, M.Si and Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd.

This research aims to determine the form of social perspective on regional elections in Sangiang Village, Bima Regency, to determine the impact of regional elections on social perspectives in Sangiang Village, Bima Regency. The type of research carried out is qualitative research which aims to understand more deeply the social perspective in regional elections and the impact of regional elections. Informants were determined using *purposive sampling* based on the specified characteristics of the informants, namely the village government, youth leaders, and the Sangiang village community. Data collection techniques are observation, documentation and in-depth interviews. Data analysis techniques go through various stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions, while data validity uses triangulation of techniques, time and sources.

The research results found in this research are from the aspect of a social perspective on the regional elections in Sangiang Village, Bima Regency. First, democracy is provided directly through the people with freedom and openness to choose and be elected with a level of active community participation. Second, political dynamics occur with political contestation. thus giving rise to group competition which becomes increasingly visible after the regional election process is over amidst the social conditions of society. The impact of the regional elections in Sangiang Village occurred, namely positive and negative impacts, the positive impact was changing people's behavior from passive to active and increasing internal solidarity within community groups, then the negative impact of money politics which some people felt was related to activities and the occurrence of conflicts within the family environment.

Keywords: Social Perspective, Regional Election

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alam*in atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan Skripsi sampai Skripsi ini rampung, banyak hambatan, rintangan, dan halangan. Namun berkat bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada Skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejadad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd. Ph.D Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si. Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
5. Bapak Lukman Ismail, S.Pd. M.Pd. Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyalurkan ilmunya secara ikhlas dalam mendidik penulis..
7. Sahabat-Sahabatku serta teman-teman yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, membantu serta siap menemaniku dalam suka maupun duka, pertengkaran kecil penuh canda dan tawa yang selalu mewarnai kebersamaan kita selama perkuliahan akan selalu aku rindukan. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap abadi selamanya.

8. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar..

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar,13 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Konsep.....	9
B. Landasan Teori.....	22

C. Kerangka Pikir	23
D. Hasil Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Analisis Data	30
I. Teknik Keabsahan Data	31
J. Etika Penelitian	32
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN.....	34
A. Sejarah Singkat Desa Sangiang.....	34
B. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bima	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	54
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	23
Gambar 2.....	36
Gambar 3.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	37
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara Indonesia pada masa transisi. Penyelenggaraan pilkada bertujuan untuk menjamin pemimpin daerah benar-benar bertindak untuk rakyat, sehingga rakyat sendirilah yang menyelenggarakan pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, penyelenggaraan pilkada untuk memilih pemimpin daerah merupakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu memperjuangkan kepentingannya.

Sistem pemilu daerah di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemilukada langsung dan pemilukada tidak langsung. Hal utama yang membedakan kedua cara tersebut adalah berdasarkan partisipasi politik yang dilakukan atau dilakukan warga negara, dan khususnya pada perbedaan cara penggunaan suara. Cara paling efektif untuk membedakan pemilukada langsung dan tidak langsung adalah dengan melihat prosedur yang digunakan. Pada pemilukada tidak langsung, partisipasi masyarakat dalam prosesnya sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali, dan masyarakat ditempatkan sebagai penonton dalam proses pemilukada yang hanya melibatkan para profesional. Rakyat hanya menjadi objek politik, misalnya dalam hal dukungan dan dukungan, yang peran dan partisipasinya berada di tangan politisi, baik DPRD

maupun pimpinan pusat. Dalam pemilukada tertentu, partisipasi masyarakat pada berbagai tingkat pekerjaan terlihat jelas dan terbuka.

Pemilihan kepala daerah yang disebut Pilkada merupakan suatu kegiatan politik, yaitu pemilihan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur dan gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta walikota dan wakil walikota, disebut juga pemilu lainnya, adalah pemilihan penyelenggara pemerintahan di daerah dan daerah/kota untuk memilih gubernur dan wakil presiden. gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan dalam sistem demokrasi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini diselenggarakan berdasarkan undang-undang no. 32 Tahun 2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, dan walikota, serta kepala provinsi, daerah, dan pemerintahan daerah, dipilih dalam cara yang resmi. Jika dicermati, ternyata ketentuan pasal 18 ayat (4) UU 1945 tidak menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui pemilihan langsung. Namun mengingat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya bertepatan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk melalui pemilihan langsung.

Harapan munculnya demokrasi, diusung bahwa pemerintah adalah yang utama bagi rakyat dan bukan sebaliknya, nyatanya pemilukada langsung itu tidak mudah padahal itu benar-benar ide demokrasi. Tentu saja, hal ini tidak

dapat menjamin berkembangnya sistem demokrasi secara penuh. Namun pilkada langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 masih menimbulkan berbagai perselisihan, termasuk terkait dengan pengangkatan kepala daerah dan wakil-wakilnya oleh partai politik. Ketentuan ini dinilai menjadi titik lemah pengembalian kebijakan keuangan antara kandidat dan kelompok yang memilihnya. Kemudian, calon-calon yang diajukan para politisi bisa saja adalah orang-orang yang kurang dikenal di dalam negeri, jika hal ini terjadi maka masyarakat di negara tersebut akan diberikan suara untuk memilih pemimpin-pemimpin lokal yang tidak terlalu “buruk” dibandingkan masa lalu. Oleh karena itu, impian terbentuknya pemerintahan daerah yang demokratis, yakni pemerintahan daerah yang menempatkan rakyat sebagai landasan kerjanya menjadi utopis.

Pilkada berarti mengembalikan “hak-hak dasar rakyat” kepada daerah dengan memberikan kekuasaan penuh melalui partisipasi politik lokal. Dalam hal ini, Negara mengizinkan masyarakat lokal untuk memutuskan sendiri segala macam kebijakan mengenai kualitas hidup penduduk lokal. Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan pilkada merupakan suatu proses baru yang bersejarah dan revolusioner dalam kehidupan berbangsa di Indonesia diharapkan para wakil kepala daerah mampu melahirkan pemimpin yang dekat dan menjadi dambaan seluruh lapisan masyarakat, namun minimal perilaku dan akuntabilitas terhadap konstituennya yang benar-benar rakyat yang dipimpinnya. Masyarakat mempunyai hak langsung untuk menilai apakah tindakan pemimpin daerah sudah sesuai dengan harapannya. Jika kepala daerah

tidak mendapat kepercayaan masyarakat, maka masyarakat dapat mendukungnya dengan tidak memilih pada pilkada berikutnya.

Karena adanya pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak memilih kepala daerah tempat tinggalnya secara langsung, calon, sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan kepala daerah akan menjadi bagian dari proses yang lebih luas untuk mencapai pemerintahan daerah yang demokratis. Keberadaan pilkada secara langsung berfungsi untuk mentransfer kekuasaan politik para pemilih karena pemilih merupakan aktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, pengetahuan, kesadaran dan kemampuan memilih orang-orang yang berkualitas dan berdedikasi merupakan syarat utama untuk menciptakan karakter demokrasi melalui pilkada.

Sebelum ada undang-undang nasional. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, dimana pemimpin daerah tidak dipilih secara langsung, melainkan hanya melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan, maka pemilu tidak mempunyai arti politik, karena rakyat ditempatkan dalam situasi politik karena adanya agenda politik yang besar. Suara H, Rozali Abdullah, pelaksanaan kemerdekaan luas dan pemilihan kepala daerah secara langsung, (Jakarta: Raja Gravido persada, 2005), masyarakat berhati-hati, begitu pula dengan adanya lembaga politik yang mewakili pandangannya. Melalui pilkada langsung diharapkan pintu demokrasi terbuka, masyarakat yang mempunyai hak politik dan administratif dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, dan masyarakat akan memutuskannya melalui pemilu langsung. tapi ini. tidak ditemukan dalam kenyataan.

Masyarakat merupakan faktor utama yang mewujudkan demokrasi di suatu negara, sehingga masyarakat juga harus memahami cara kerja sistem pemilu di negaranya, mengenal politisi dan ikut serta dalam proses bernegara. Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai perilaku umum para politisi dan warga negara yang menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, dan antar kelompok masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Almond dan Verba, yang dimaksud dengan budaya politik adalah pandangan warga negara terhadap sistem politik dan berbagai bentuknya, serta sikap terhadap peran warga negara dalam sistem tersebut.

Selain berpartisipasi dalam sistem yang dijalankan di daerahnya, masyarakat juga harus memahami serta memiliki persepsi atau pandangan terhadap politik terkhusus pada Pilkada. Masyarakat menguat secara struktural sehingga mendorong kemunculan tuntutan perluasan partisipasi politik atau demokratisasi secara umum. Hal ini tentu saja menciptakan harapan-harapan politik baru ditengah masyarakat, sekalipun kecenderungan praktis ke arah perubahan itu dalam kasus Indonesia masih terlihat secara sangat tersamar.

Pemilihan pimpinan daerah periode ini dijadikan tolak ukur untuk mengetahui partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang sesungguhnya. Semakin tinggi jumlah kontribusi maka manfaatnya sendiri akan semakin memperkuat sistem pendidikan politik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, partisipasi diartikan sebagai proses penguatan lembaga-lembaga lokal yang memahami dan lebih memahami proses ekspresi kekuasaan di daerah.

Masyarakat akan semakin sadar akan kerja kebijakannya dan pentingnya mewujudkan tata kelola yang baik melalui kerja yang baik dan berkualitas.

Terselenggaranya demokrasi sangat ditentukan oleh kematangan negara, dalam artian demokrasi akan terlaksana apabila negara tersebut mempunyai budaya politik, sedangkan budaya politik sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman terhadap negara dan menghormati negara hukum sebagai proses pelaksanaan pemilu daerah. Penyelenggaraan pilkada dapat dikatakan sukses apabila negara mempunyai basis politik yang kuat. Dapat diasumsikan bahwa suatu negara mempunyai budaya politik yang tinggi yang ditentukan oleh sejauh mana tingkat pengetahuan negara tersebut diukur melalui pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Budaya politik masyarakat akan membaik jika partai politik memenuhi perannya dalam hubungan politik yang nyata. Artinya, partai politik ingin membangun budaya politik masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang sering terjadi di lapangan yang kemudian di temui oleh peneliti bahwa ada kebijakan-kebijakan di daerah yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi keinginan pihak-pihak yang lebih mendukung pemimpin daerah dari pada masyarakat. Namun, hubungan antara pemimpin lokal dan masyarakat jelas dapat ditingkatkan karena pemimpin lokal bertanggung jawab atas hasil yang lebih baik. Jikalau mereka gagal memerintah dengan baik, dan langsung datang pilkada, maka rakyat tidak akan terpilih lagi, karena justru pemimpin daerah akan terekam di benak rakyat seperti ini seorang pemimpin yang gagal.

Disisi lain, sebagian masyarakat menilai adanya visi-misi Bima Religius, Aman, Makmur, dan Handal. Bima RAMAH bagus dari konseptual dan relevan dengan kondisi Bima saat ini, akan tetapi visi-misi tersebut dangkal dalam implementasinya. Persoalan keamanan dan religius merupakan realitas mendasar sosial budaya masyarakat. Visi-misi Bima RAMAH lemah dari aspek implementasi, salah satunya ditinjau dari postur APBD, sehingga keberpihakan APBD memproteksi desain masyarakat dengan tidak adanya konsep dan ketersediaan anggaran untuk resolusi konflik.

Dengan demikian, masyarakat kecewa terhadap pemerintah dengan janji-janji politik selama memimpin dana mbari (tanah bima), namun jauh dari ekspektasi. Pemerintahan Kabupaten Bima bak seperti mobil mogok, bergerak maju juga tidak, malahan semakin mundur ke belakang. Masalah pembangunan infrastruktur sangat jauh dari harapan masyarakat dalam membutuhkan perbaikan akses jalan lintas Wera-Sape, sehingga masyarakat menuntut agar akses jalan tersebut diperbaiki. Belum lagi di sektor pariwisata yang amburadul tanpa perencanaan, bangunan sekolah yang mengkhawatirkan, nasib guru-guru sukarelawan dan masih banyak permasalahan lainnya. Hal ini memicu lahirnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bima, sehingga muncul dipermukaan dengan narasi tolak bupati Bima 2 periode dan bupati gagal.

Oleh sebab itu, tugas pemerintah daerah mesti mendesain konsep pembangunan dan memiliki kemampuan mengkonsolidasi masyarakat melalui perangkat serta pengawasan terhadap birokrasinya. Selain itu, ekspektasi utama

masyarakat menginginkan pemerintah memiliki konsep dan target yang mesti dapat diwujudkan dan bisa menentukan bagi arah kemajuan suatu daerah.

Dari penjelasan uraian latar belakang tersebut, kemudian peneliti berkesan agar dilakukan penelitian dengan judul; **“Perspektif sosial dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bima”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, sehingga dapat dibuat rumusan masalah terakait topik penelitian yang menjadi fokus peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perspektif sosial terhadap pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah dampak pilkada terhadap perspektif sosial di Desa Sangiang Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas dan susunan rumusan masalah yang dibuat , kemudian tujuan dai penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perspektif sosial terhadap pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui dampak pilkada terhadap perspektif sosial di Desa Sangiang, Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat yang didapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menghadirkan sumbangan bagi pengembangan ilmu sosial, secara khusus ilmu sosiologi, kemudian bisa menjadi rujukan peneliti yang akan datang yang meneliti topik yang sama tentang pilkada dan perspektif sosial bagi masyarakat di daerah kabupaten Bima.

2. Manfaat Praktis

a. Yang menjadi objek penelitian, ialah di Kabupaten Bima, khususnya masyarakat Desa Sangiang yang dijadikan focus penelitian serta acuanannya terkait Pilkada. Untuk peneliti sendiri, dapat mengembangkan pengetahuan tentang sosiologi khususnya mengenai perspektif sosial dalam pilkada.

b. Jadi rujukan referensi, agar bisa bahan penambah wawasan para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

pada bagian ini peneliti akan menjelaskan defines beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, kemudian adapun pengertiannya sebagai berikut :

1. Perspektif yakni suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
2. Sosial adalah segala macam perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non individualis dan merupakan salah satu satuan sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

3. Pilkada merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Perspektif Sosial

a. Definisi Perspektif Sosial

Melihat hubungan antar manusia atau yang sering disebut dengan realitas sosial, demikian pula halnya. Refleksi atau observasi terhadap realitas seringkali diawali dengan hipotesis, yaitu pendapat individu yang belum teruji kebenarannya. Dari gagasan-gagasan tersebut berkembang menjadi suatu konsep, pengamatan atau contoh peristiwa-peristiwa yang berkembang di alam semesta, yang menurut para ilmuwan merupakan suatu proses yang sistematis, selalu dan jelas sehingga setiap orang dapat memahami akibatnya. Perspektif adalah seperangkat pemikiran dan keyakinan tentang sesuatu, berdasarkan cara orang memandang sesuatu dengan cara tertentu. Imajinasi menuntun setiap orang untuk mengetahui bagian penting dari objek yang dipilih dari beberapa sudut pandang yang akan dipertimbangkan secara logis. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah suatu sistem pemikiran, prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang mempengaruhi pemikiran manusia sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan sesuatu dalam situasi tertentu.

Dari segi ilmu sosial juga mempunyai cara pandang yang memandang sistem sosial berdasarkan struktur, gagasan, dan nilai yang melingkupi sistem sosial tersebut, sehingga menjadi konsep pendekatan, atau kadang disebut paradigma. Dalam metode studi sosial, sekalipun gagasan-gagasan tersebut

berbeda, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain, gagasan ini sekali lagi merupakan satu-satunya cara untuk mendekati masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori sosial merupakan contoh observasi dalam ilmu sosial dan studi tentang hubungan manusia atau seluruh siklus kehidupan. Perkembangan lainnya, terdapat empat teori dalam sosiologi, yaitu teori evolusi, interaksi sosial, pekerja, dan konflik.

b. Bentuk-Bentuk Perspektif Sosial

Dari penjelasan di atas mengenai perspektif sosial, bahwa dapat dijelaskan pembagian mengenai perspektif ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Perspektif evolusionis

Evolusi dapat diartikan sebagai perubahan, sehingga berkaitan dengan sosiologi, jadi perubahan yang dimaksud menitikberatkan pada perubahan masyarakat dan kehidupannya. Konsep memberikan penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana masyarakat tumbuh dan berkembang. Proses pembangunan sosial dilihat dengan menetapkan status quo antara yang terbelakang dan yang matang, yang berarti menarik garis batas cara hidup masyarakat dari yang dasar keterbelakangan ke cara hidup yang ada. standar hidup akan selalu sama. menempatkan generasi baru dalam evolusi kehidupan yang selalu berproses.

Orang yang peduli dengan menggunakan sudut pandang ini dan jenis pengembangan muncul di masyarakat dengan berfokus pada awal kehidupan mereka. Dalam perspektif ini secara umum, kita dapat mengatakan bahwa

perubahan manusia atau masyarakat selalu maju, tetapi ada hal-hal tertentu yang sama sekali tidak ditinggalkan dalam model kehidupan baru dan akan terus dibawa bahkan jika ini hanya kecil sekaligus perubahan terbaru. Selain itu, teori ini menekankan bahwa masyarakat sebagai suatu tubuh atau kehidupan mengalami proses pemisahan dan integrasi. Kehidupan masyarakat sebagai bagiannya terus mengalami kemajuan dengan tujuan memperbaiki sistem yang ada, sehingga dalam proses perubahan sosial ada empat faktor penting, yaitu :

- a) Asal muasal dari masyarakat maju saat sekarang
- b) Jenjang perubahan masyarakat
- c) Pemicu perubahan sosial
- d) Arah perubahan masyarakat yang akan terjadi

2) Perspektif Interaksionis

Ide ini dikembangkan oleh George Herbert Mead (1863-1931) dan Charles Horton Cooley (1846-1929) melalui observasi yang berfokus pada interaksi individu. Komunikasi tertulis dan lisan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan simbol, tanda, kata-kata, dan gerak tubuh. Dari sudut pandang ini, manusia dapat dianggap memiliki emosi dan pikiran sebagai makhluk hidup. Emosi dan pemikiran memberi orang kemampuan untuk memahami situasi yang mereka hadapi dan bertindak sesuai interpretasi mereka. Sikap dan perilaku masyarakat tidak dipaksakan oleh struktur di luar dirinya (yang membentuknya), dan juga tidak semata-mata ditentukan oleh masyarakat.

Dengan kata lain, perspektif ini berfokus pada interaksi antara individu dan kelompok, terutama menggunakan simbol-simbol seperti bahasa lisan dan tulisan, gerak tubuh, dan kata-kata.

Perspektif interaksionis adalah suatu pendekatan/perspektif dapat digunakan untuk mempelajari fenomena dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil dari proses interaksi, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan interaksi antar individu di lingkungan rumahnya dan masyarakat pada umumnya.

3) Perspektif Fungsionalis

Dari sudut pandang ini, masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir dan teratur serta mempunyai seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Tokoh dari perspektif ini antara lain Talcott Parson, Kingsley Davis, dan Robert K. Merton. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil, harmonis dan seimbang. Menurut pandangan ini, setiap kelompok atau organisasi bersifat fungsional sehingga secara terus menerus melakukan tugas-tugas tertentu, dan muncul pola perilaku karena berguna secara fungsional.

Perspektif ini lebih menekankan pada ketertiban dan stabilitas masyarakat, institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama dianalisis berdasarkan bagaimana institusi tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya dalam analisis ini kita melihat lembaga sejauh mana berperan dalam menjaga stabilitas masyarakat, oleh karena itu dalam organisasi formal individu membuat peraturan dan melaksanakan peraturan sebagai sarana

untuk mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. mengatur

Perspektif fungsional menekankan empat hal berikut dalam perkembangannya:

a) Masyarakat tidak dapat bertahan jika para anggotanya tidak mempunyai pemikiran, sikap dan nilai yang sama.

b) Setiap bagian mempunyai kontribusi tersendiri terhadap keseluruhan

c) Masing-masing bagian saling terintegrasi dan saling memberikan dukungan

d) Setiap orang memberi kekuatan agar seluruh masyarakat menjadi stabil

4) Perspektif Konflik

Perspektif ini menjelaskan bahwa masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik yang terus-menerus baik antara individu maupun kelompok, karena perspektif ini menekankan adanya perbedaan individu dalam mendukung sistem sosial. Menurut perspektif ini, masyarakat juga terdiri dari individu-individu, yang masing-masing mempunyai individu. . keberhasilannya. Pencapaian kebutuhan tersebut berbeda-beda karena kemampuan individu berbeda-beda. Persaingan kebutuhan memicu konflik di masyarakat. Selain itu, perspektif konflik menitikberatkan pada konsep ketimpangan kekuasaan dan otoritas dalam sistem sosial, sehingga menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dirancang untuk selalu berinteraksi, sehingga sebagian pemikir memandang interaksi sosial sebagai penyebab konflik. . Tokoh yang mengambil inisiatif atau pemikiran dari sudut pandang tersebut: Karl Marx, Hegel, Lewis Coser dan Frederich Engles. Melihat

masyarakat yang selalu berubah, terutama dinamika para penguasa yang masih berusaha mempertahankan dan meningkatkan kedudukannya.

Perspektif ini mengasumsikan bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai tujuan masing-masing dan tidak pernah terintegrasi untuk mencapai tujuan, kelompok tersebut sering kali harus mengorbankan pengaruh lain. Oleh karena itu, konflik selalu muncul. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada studi tentang struktur sosial dan institusi sosial yang melihat masyarakat terus berubah dan setiap bagian masyarakat mempunyai potensi untuk mendorong dan menciptakan perubahan sosial dalam rangka menjaga ketertiban sosial. tentang peran kekuasaan.

2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a. Definisi Pilkada

Pemilihan umum/pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi. Secara tidak langsung demokrasi di Indonesia berarti pelaksana kedaulatan adalah wakil rakyat. Pemilu diselenggarakan untuk menentukan siapa yang berhak mewakili rakyat. dalam pemilu/pemilu, harapannya adalah anggota parlemen benar-benar mewakili keberagaman keadaan dan aspirasi masyarakat yang memilihnya. Dalam sistem politik elektoral, terdapat tiga lembaga pemersatu dengan demokrasi, yaitu:

- 1) persaingan, yaitu apakah seseorang dapat diijinkan melamar mewakili rakyat sebagai calon
- 2) partisipasi politik, yaitu rakyat ikut serta dalam pemilihan wakil atau pemimpinnya dan memilih mereka menjadi pemimpin semua.

3) kebebasan politik dan kebebasan sipil, yang dinyatakan dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, yang menjadi dasar persaingan dan peran.

a. Asas Pelaksanaan Pilkada

Pemilihan parlemen diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Secara langsung, yaitu. masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum. Hal ini berarti menjamin adanya kesempatan yang memadai bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, kelas dan gender, pekerjaan, atau status sosial.
- 3) Kebebasan, yaitu semua warga negara yang mempunyai hak memilih mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun.
- 4) Kerahasiaan. Dalam memilih, pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapa pun atau dengan cara apa pun Jujur dalam penyelenggaraan pemilu baik itu aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jujur dalam melaksanakan pemilu, baik pejabat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak wajib berlaku jujur sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

- 6) Keadilan. Artinya, ketika pemilu diselenggarakan, semua pemilih diperlakukan sama dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu partai politik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Menurut undang-undang ini, “kepala daerah” berarti kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara demokratis dengan memperhatikan tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterwakilan Dewan berpendapat, antara lain, DPRD tidak mempunyai kewajiban dan wewenang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga pemilihan umum yang demokratis berdasarkan undang-undang ini dilakukan langsung oleh rakyat atas dasar itu.

Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberi wewenang untuk memelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pemerintah dalam pembangunan kehidupan demokrasi, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan umum. peran strategis. Demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak hanya antar daerah tetapi juga antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan para pengurus daerah dan wakil kepala daerah yang mau berinovasi, menatap masa depan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan sebagai dasar hukum formal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah:

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai calon dipilih langsung secara demokratis berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan tidak memihak.
- 2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

b. Tahapan dan Aturan Pilkada

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahapan pemilihan presiden daerah pemilihan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1) Tahap persiapan meliputi:

- a) Perencanaan program dan anggaran
- b) Penyusunan peraturan mengenai penyelenggaraan pemilu
- c) Rencana pelaksanaan. Ini termasuk keputusan.

2) Tahap pelaksanaan meliputi:

- a) Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota
- b) Pendaftaran pasangan calon gubernur dan sepasang calon wakil gubernur, sepasang calon bupati dan sepasang calon wakil bupati, serta sepasang calon walikota dan sepasang calon wakil walikota.
- c) Meneliti persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota.
- d) Penetapan pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- e) Pelaksanaan kampanye
- f) pelaksanaan pemungutan suara;
- g) Penghitungan suara dan tabulasi hasil penghitungan suara
- h) Penetapan calon terpilih
- i) Penyelesaian pelanggaran dan perselisihan hasil pemilu
- j) Usulan untuk mengukuhkan pengangkatan calon terpilih.

Peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang antara lain:

- 1) Dalam Umum Kabupaten/Kota. pilkada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan.

- 2) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Dalam hal memilih pada Pemilihan kepala daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- 2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya
- 5) Peraturan yang diatur oleh undang-undang antara lain:
 - 1) Dalam wilayah umum prefektur/kota. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilu yang diusulkan oleh partai politik, organisasi partai politik, atau perseorangan yang terdaftar atau terdaftar pada KPU.
 - 2) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Dalam hal memilih pada Pemilihan kepala daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau

b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) pada saat pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

c. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19), pemilu mempunyai tiga tujuan.

1) Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik.

2) Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat kepada wakil rakyat, melalui wakil-wakil terpilih atau partai politik yang memperoleh kursi, untuk menjamin terpeliharanya integrasi ke dalam masyarakat.

3) Pemilu sebagai sarana menghimpun, menggalang, atau memperoleh dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.

Lebih lanjut menurut Huntington (2001:18), penyelenggaraan pemilu memiliki tiga tujuan:

1) Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi berasumsi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena rakyat berdaulat dan tidak dapat memerintah secara langsung, maka rakyat dapat memilih wakilnya melalui pemilu, dan wakil rakyat dapat memutuskan siapa yang akan berkuasa

.2) Pemilu sebagai sarana pembentukan representasi politik. Melalui pemilu, warga negara dapat memilih wakil-wakil yang mereka yakini dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dengan jelas. Semakin tinggi kualitas pemilu maka semakin baik pula kualitas wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat.

3) Pemilu sebagai sarana konstitusional pergantian pemimpin. Pemilu dapat mengukuhkan pemerintahan saat ini atau mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat akan kembali mempercayai pemerintah yang ambisius untuk memimpin, dan sebaliknya jika mereka tidak mempercayai pemerintahnya. Pemerintahan ini akan berakhir dan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat akan dilantik

d. Dampak Pilkada

Dampak positif pemilu lokal terletak pada prinsip “satu orang, satu suara” yang paling mendekati prinsip demokrasi. Prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh sistem perwakilan model apa pun. Pemilihan pemimpin daerah akan memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menarik pemimpin daerah yang unggul dalam akuntabilitas. Sejak tahun 2005, pergantian kepemimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota, terjadi langsung di seluruh Indonesia. Di tingkat lokal, pemilihan langsung pemimpin daerah (gubernur, walikota, bupati) merupakan media pembelajaran politik di akar rumput (masyarakat), sekaligus menjaga dan mengedepankan etika moral dalam demokrasi (Kumyoo, 2010).

Penyelenggaraan pemilu lokal langsung pasca konflik menciptakan ruang demokrasi yang luas di masyarakat lokal, memberikan legitimasi yang tinggi kepada pemimpin daerah, dan menciptakan landasan visi dan misi bagi pemimpin daerah yang menjadi landasan dasar perencanaan daerah. Namun fenomena masih lemahnya pelayanan publik pada otonomi daerah tidak lepas dari politik elektoral langsung pasca-konflik. Sebenarnya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan anggaran pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, namun yang tidak disadari masyarakat adalah bagaimana APBD yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat kemudian dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang. apakah dana tersebut akan dialihkan untuk menutupi biaya politik dalam pencalonan. manajer wilayah Kenyataannya, biaya yang harus dikeluarkan oleh calon-calon terkemuka di daerah dalam pemilu lokal pasca-konflik sangatlah besar. Sebab, calon-calon daerah harus membayar

mahar, biaya kampanye, dan kemampuan membeli suara partai pengusungnya. Dalam pilukada, calon wajib menyetorkan mahar kepada partai politik tertentu untuk penggunaan kendaraan mengikuti pilukada.

Partai Politik. Artinya, pilukada pasca-konflik tidak akan berhasil dan hanya akan membuat masyarakat semakin tidak bahagia. Analisis mengenai Amerika Selatan dan Afrika Barat yang dilakukan oleh James Manners dan Richard Crook menunjukkan adanya hubungan antara pemilihan kepala daerah langsung dan tata kelola yang buruk (Eko Prasjo: 2009). Dampak negatif pilukada terhadap pelayanan publik dan administrasi publik adalah, pertama, pemimpin daerah cenderung mengganti biaya politik pilukada melalui APBD karena kebijakan keuangan yang ditempuh selama proses pilukada; Kegiatan empati, biaya iklan, dan biaya pendaftaran pendukung partai politik secara langsung mempengaruhi biaya kampanye lokal para kandidat. Oleh karena itu, untuk membayar kembali investasi politik, APBD merupakan sasaran yang paling mudah untuk membayar kembali biaya politik melalui distribusi sumber daya, seperti pengadaan barang dan jasa.

B. Landasan Teori

1. Teori Tindakan Sosial

Teori dan tokoh yang paling terkenal dengan gagasan tentang perilaku sosial ini adalah Max Weber. Pasalnya, dialah pionir yang mengungkap keseluruhan cakupan perilaku tersebut. Menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut

dapat mempertimbangkan tindakan orang lain dan ditujukan pada tindakan terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Ditambahkannya pada isi teori ini bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap mempunyai nilai subjektif bagi pelakunya disebut tindakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Weber mempelajari perilaku sosial yang mengarah pada hasil tertentu dan memberikan pola pada setiap individu.

2. Teori Struktural Fungsional

Robert K. Merton adalah seorang sosiolog yang banyak menjelaskan tentang kelompok sosial. Ia bahkan menggambarkan anomie sebagai perilaku menyimpang secara sosial yang dapat merusak hubungan sosial. Intinya, Robert percaya bahwa strukturalisme fungsional adalah cara hidup masyarakat dalam keseimbangan sosial, dan akan berhasil jika tatanan sosial berfungsi dengan baik.

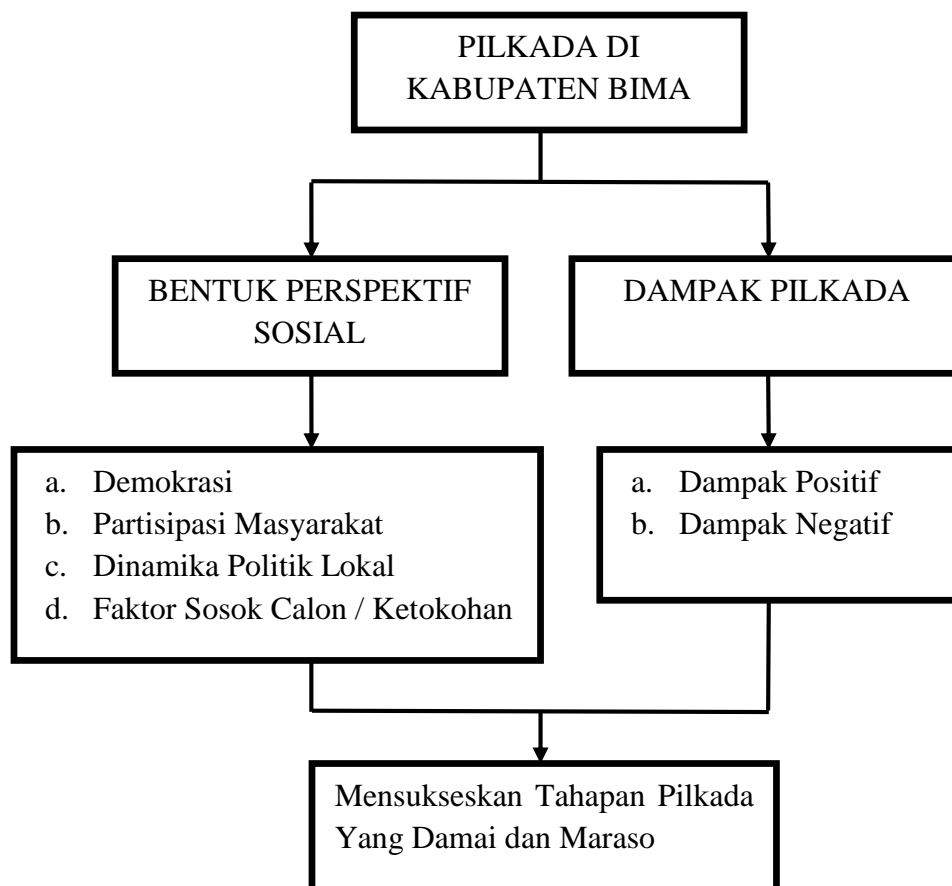
Dari penjelasan para ahli mengenai teori struktur fungsional di atas, maka dapat dikatakan bahwa teori ini mengemukakan bahwa masyarakat merupakan suatu bagian dari organisme yang memilih untuk hidup damai, tenteram dan tenteram. Setiap masyarakat mempunyai keinginan untuk menciptakan kehidupan yang baik, dan untuk mewujudkan hal tersebut

C. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka berpikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Dalam pilkada langsung, hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan

yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Dalam konteks itu negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Oleh sebab itu, fenomena kehidupan masyarakat selalu cenderung berpartisipasi dalam sistem yang dijalankan di daerahnya, masyarakat juga harus memahami serta memiliki persepsi atau pandangan terhadap politik terkhusus pada pilkada. Hal ini mengakibatkan pemilukada bukannya menyejahterakan, tetapi semakin menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, masalah tersebut akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berlokasi di kabupaten bima. Adapun bagan dari kerangka pikir tersebut adalah :

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Strategi Komunikasi Politik Caleg Dalam Kemenangan Pemilu” (Studi Kualitatif JATENG Partai Golkar pada Pemilu 2014) yang dilakukan oleh Suparman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan strategi komunikasi politik calon anggota parlemen Partai Gorongan Kariya dalam memenangkan pemilu tahun 2014; untuk mengetahui pelaksanaan strategi komunikasi politik calon anggota parlemen. Pemilihan. Dari hasil penelitian, strategi komunikasi politik caleg Golkar meliputi komunikasi dengan pesan persuasif yang meliputi door to door canvassing, menjalin silaturahmi dengan simpatisan dan pemilih, serta tim sukses; Jaringan terbukti mampu diimplementasikan dalam skala besar. Tokoh masyarakat tersebut antara lain 10 calon anggota parlemen yang terpilih menjadi anggota DPRD Jateng. Strategi ini diterapkan untuk mencapai tujuan komunikasi politik seperti partisipasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekrutmen politik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Afif B.P. dengan judul skripsi “Komunikasi politik kiai dalam penyampaian pesan politik kepada masyarakat kabupaten situbondo (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Politik Kiai Cholil As’ad Syamsul Arifin Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013)”. Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap proses komunikasi politik kiai Cholil As’ad Syamsul Arifin dalam penyampaian pesan politik pada saat

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Purposive Sampling sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah terbukti apabila tokoh masyarakat, yang dalam hal ini adalah pesan dari seorang kiai. Akan sangat berpengaruh pada prosentase hasil suara dalam pemenangan Pilihan Gubernur Jawa Tengah 2013.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Badrul Munir yang berjudul “Strategi Marketing Mix Dalam Kampanye Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Deskriptif Pada Tim Pemenangan Hariadi Suyuti-Imam Priyono dalam Pemilu Kota Yogyakarta 2011)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Marketing Mix dalam kampanye pemenangan oleh tim pemenangan HS-IP dalam memasarkan HS-IP pada konstituen, dalam hal ini masyarakat Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini penyusun memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data Depth Interview. Hasil dari penelitian ini adalah Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2012, tim pemenangan HS-IP berhasil memenangkan pasangan Haryadi Suyuti dan Iman Priyono. Hal ini tidak lepas dari kemampuan tim pemenangan HS-IP dalam melakukan manajemen kampanye. Tim berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh Haryadi Suyuti maupun Iman Priyono dengan maksimal. Tim pemenangan HS-IP menerapkan strategi Marketing Mix untuk memenangkan pasangan HS-IP selama pelaksanaan pemilu baik pada pra kampanye, saat kampanye sampai pada pemilihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena kreatif, mendalam, dan menghormati subjek. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif tentang banyak ide dalam banyak metode kualitatif, yaitu pertama, peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses dibandingkan hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memperhatikan detail. Ketiga, peneliti kualitatif sebagai alat utama pengumpulan data, dan peneliti kualitatif akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian bersama para partisipan. Keempat, penelitian menunjukkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, menafsirkan data dan memahaminya melalui kata-kata atau gambar. Terakhir, metode penelitian kualitatif bersifat kreatif dimana peneliti menciptakan gagasan, konsep atau ide dan konsep yang bersifat sementara berdasarkan data lapangan dan metode penelitian. Fraenke dan Walen dan Creswell (2016:276) Kajian penelitian fokus pada proses yang terjadi atau hasil.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian seperti halnya dengan judul penelitian saya tentang bagaimana perspektif sosial dalam pilkada di kabupaten bima, dan bagaimana dampak pilkada dalam perspektif sosial di kabupaten bima. Sesuai fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat kabupaten bima pada umumnya dan desa sangiang khususnya yang

mendengarkan keluhan dari masyarakat setempat menunjukkan sikap empati itu sangat penting, karena kita juga bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan apalagi saya sebagai peneliti berasal dari daerah tersebut.

Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologis. Pendekatan fenomenologis melibatkan penjelasan atau pengungkapan suatu pemikiran atau fenomena berdasarkan penderitaan yang terjadi pada banyak orang. Penelitian ini dilakukan dalam suasana alami, sehingga tidak ada batasan dalam penafsiran atau pemahaman terhadap materi yang dipelajari.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Menurut Lexi J. Moleong (2008), untuk menentukan wilayah penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan konsep substantif dan mengeksplorasi lapangan untuk menemukan keselarasan dengan kenyataan di lapangan, dengan tetap memperhatikan low end, masuk akal, dan praktis. Seperti waktu, biaya, dan tenaga harus diingat ketika mengidentifikasi area penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sangiang, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Penelitian ini fokus pada “Sikap Sosial dalam Pilkada di Kabupaten Bima”.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan adalah terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin pemeriksaan, yaitu jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

C. Informan Penelitian

Lexy J. Moleong (2008), informan adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian, sehingga harus mempunyai banyak pengalaman di lingkungan penelitian dan harus dengan sukarela menjadi anggota. tim peneliti, meskipun hanya secara informal. Proses identifikasi informan dalam penelitian ini merupakan penilaian yang obyektif, dimana pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Purposive sampling merupakan pemilihan informan secara cermat, yaitu suatu proses dimana informan dipilih dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Informasi penelitian merupakan sumber informasi yang dapat memberikan data penting kepada peneliti dengan cara melakukan wawancara terhadap banyak orang yang diyakini mampu memberikan data atau informasi yang benar dan akurat tentang orang yang diteliti. Informan yang memberikan informasi berbeda kepada peneliti untuk diteliti dalam mencakup tiga jenis, yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan menyimpan informasi penting.
2. Informan ahli, yaitu mereka yang berkecimpung dalam hubungan sosial.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat dalam hubungan sosial yang diteliti.

D. Fokus Penelitian

Spradley dan Sugiyono (2013: 286) mengatakan bahwa fokusnya adalah pada satu atau lebih aspek yang berkaitan dengan situasi sosial. Oleh karena itu,

penentuan arah penelitian dan rencana bergantung pada tingkat informasi baru yang dapat diperoleh dari situasi sosial (bagian).

Kemudian menurut Spradley (Prastowo, 2014:137), ada empat cara menentukan arah penelitian, yaitu:

1. Tentukan kata-kata yang disarankan oleh informan..
2. Penentuan fokus didasarkan pada domain-domain tertentu yang mengatur domain tersebut.
3. Membuat pedoman yang mempunyai nilai penemuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menemukan arah berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan ide-ide terkini.

Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan atau fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan perspektif masyarakat dalam pemilu/kada di kabupaten Bima?
- b. Dampak pilkada terhadap ekspektasi masyarakat di kabupaten Bima?

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun jika tujuan penelitian sudah jelas, maka tidak menutup kemungkinan diciptakan alat penelitian yang sederhana, diyakini mampu memuaskan data dan membandingkannya dengan data yang diterima. diidentifikasi melalui observasi dan wawancara. Sugiyono (2016:307).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat navigasi atau peneliti sendiri dan dibantu dengan alat-alat salah satunya sebagai berikut:

1. Alat yang digunakan dalam proses penelitian kualitatif antara lain buku catatan dan pulpen. Jurnal ini merupakan jurnal yang memuat kegiatan penelitian yang berkaitan dengan perspektif/teori sosial.
2. Peralatan yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah kamera yang digunakan untuk mengambil gambar atau merekam peristiwa.
3. Perekam suara, alat yang digunakan untuk merekam suara sama seperti dari pesan survei saat peneliti mengambil pesan.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sugiyono (2010:15) data yang diperlukan untuk analisis ialah berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap objek. Untuk melengkapi data, dilakukan wawancara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebagai alat pengumpulan data. Dalam hal ini sumber data (data primer) diperoleh langsung dari masing-masing narasumber dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca dan berbagai sumber lain antara lain surat pribadi, surat kabar, dan dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Survei/observasi adalah proses pengumpulan informasi yang melibatkan pengumpulan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden sebagai sampel populasi.
2. Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, artinya peneliti bebas bertanya kepada responden sesuai dengan jenis pertanyaan yang diajukan sebelumnya.
3. Dokumentasi adalah penggunaan informasi dari dokumen-dokumen tertentu yang diambil sebagai pendukung. Keuntungan menggunakan dokumen ini adalah agar memungkinkan bagi peneliti untuk memeriksa kebenaran ejaan atau nama dan gerakan profesional yang disebutkan selama wawancara.

H. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus tanpa jenuh. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari data lapangan yang direkam.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi atau laporan yang berbentuk teks naratif yang didukung dengan tabel atau grafik yang dimaksudkan untuk menambah pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh dan memungkinkan diambilnya kesimpulan dari analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Mencari makna, catatan, pola, definisi, struktur, dan alur sebab, akibat, dan batasannya. Kesimpulan selalu diuji kebenarannya, koherensinya dan relevansinya sehingga dapat diambil kesimpulan yang jelas.

I. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data sangatlah penting, karena tanpa verifikasi data yang diperoleh di lapangan, peneliti akan kesulitan menjawab pertanyaan tentang hasil penelitiannya. Dalam hal validasi data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu memeriksa data dari tempat yang berbeda dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda, sebagai berikut:

1. Triangulasi teknis

Triangulasi teknis dicapai dengan menggunakan metode berbeda untuk menganalisis data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dianalisis melalui observasi, dokumentasi, angket dan partisipasi.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi temporal digunakan untuk mendukung data terkait perubahan tren dan perilaku manusia, karena perilaku manusia berubah seiring berjalannya waktu. Untuk memperoleh data yang akurat dari observasi, peneliti harus melakukan survei, bukan observasi tunggal.

3. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam penelitian, oleh karena itu aspek etika harus diperhatikan. Masalah perilaku yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Informed consent

Informed consent diberikan sebelum melakukan survei ini dalam bentuk informed consent untuk menjadi responden. Memberikan informed consent untuk memastikan bahwa subjek memahami maksud dan tujuan penelitian serta memahami implikasinya.

2. Tanpa nama

Permasalahan standar pendidikan merupakan permasalahan yang menjanjikan dalam penggunaan bahan penelitian dengan tidak memberi atau menambahkan nama responden pada lembar sampel dan hanya mengkodekan serta mengumpulkan lembar data atau hasil penelitian.

3. Kerahasiaan

Semua informasi yang dikumpulkan dan bahan-bahan lain bersifat rahasia oleh peneliti, hanya sebagian data yang akan dilaporkan dalam hasil penelitian.

4. Jujur

Integritas, antara lain dalam menyusun bahan pustaka, mengumpulkan data, melaksanakan metode penelitian dan metode penelitian, serta mempublikasikan hasilnya. Jujurlah mengenai kelemahan atau kegagalan metode yang digunakan. Hargai sesama reviewer, jangan mengklaim karya yang bukan milik Anda sebagai karya Anda.

5. Tujuan

Berusaha untuk meminimalkan kesalahan dalam desain uji coba, analisis dan interpretasi data, penilaian, pakar/mitra penelitian, penilaian pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.

6. Integritas

Selalu menepati janji dan kesepakatan, melakukan riset dengan ikhlas, dan selalu berusaha untuk tetap konsisten dalam pemikiran dan perilaku.

7. Keterbukaan

Dimaksud berbagi data, hasil, gagasan, sumber daya, dan sumber penelitian secara terbuka terhadap kritik dan gagasan baru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sangiang

Desa Sangiang mempunyai sejarah dengan desa lainnya, sehingga awal mula berdirinya desa tersebut mempunyai latar belakang. Pada saat itu, Sekitar tahun 1956, ada seorang musafir dan pedagang asal Tanjung Malaka bernama Tengku Awi (Raden Alwi) yang selain ahli dalam bidang usaha dan ahli dalam pembuatan obat tradisional, ia juga sedang mencari obat pada saat itu, adalah yang terbanyak di Sangiang. Tengku Alwi hidup selama 13 tahun dan merupakan orang pertama yang memberi nama desa ini Sangiang. Pada masa pemerintahan Jeneli Mpore, komunitas Sangiang didirikan berdasarkan instruksi Jeneli Mpore kepada umat beragama dan adat seperti: H. Arrahman Abu Tua Hawa, Ibrahim Ompu Kaka, H. Yasin Bahasa, H. Sanusin Abu Mbolo, Kasrin Ompu Lebe, H. Barahima M.Saleh.

Dalam perundingan antara Jeneli Mpore dengan orang-orang tersebut, tercapai keputusan atau kesepakatan untuk memberikan Dalu Dona sebagai Dalu yang disebut kepala desa sekarang, masa jabatan Dalu Dona adalah 9 tahun. Setelah itu Dalu Dona bukan lagi Dalu, melainkan dikelola oleh pemerintah dalam hal ini:

1. Dalu Ali menjabat selama 8 tahun.
2. Dalu Bahasa atau disebut Ompu Wa'u selama 16 tahun, ia meninggal saat berkuasa.
3. Dalu H. Jamaluddin meninggal dunia setelah dua puluh tahun berkuasa.

Semua pemimpin Dalu di atas tidak dipilih, melainkan berdasarkan rencana dan usulan umat agama/adat yang hanya disetujui oleh Jeneli Mpore. Pada masa pemerintahan Dalu H. Jamaluddin (sekitar tahun 1950), berakhirilah masa pemerintahan “Bora adat” yang pada akhir masa Kesultanan digantikan oleh masa pemerintahan Swapraja.pemerintahan, rakyat langsung memilih pemimpin berikutnya.

Jadi pemimpin Sangiang adalah:

1. H. Imran tiga puluh dua tahun menjabat sebagai kepala desa.
2. Drs. Saidin Murtada tiga belas tahun menjabat kepala desa.
3. A. Rasyid H. Imran, SE selama 6 tahun menjabat.
4. Muhammad Saleh H. Mustaram 5 tahun sebagai kepala desa.
5. A. Rasyid H. Imran, SE sebagai kepala desa sampai sekarang.

Setelah dari uraian sejarah atau latar belakang diatas, Saat ini desa sangiang terdiri dari delapan dusun antara lain :

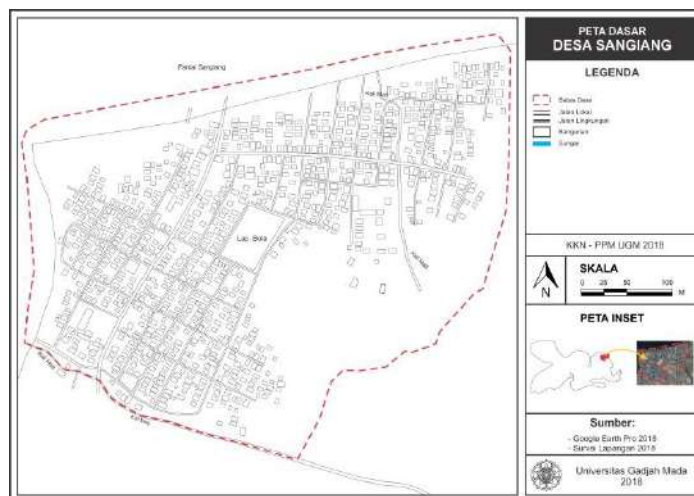
- a. Dusun Doroma
- b. Dusun Karombo
- c. Dusun Sangiang
- d. Dusun Bronjong
- e. Dusun La Sinta
- f. Dusun Sarae
- g. Dusun Tewo
- h. Dusun La Joro

Secara geografis, Desa Sangiang merupakan salah satu dari empat belas (14) desa yang berada di bagian timur Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 16.424 ha dan jumlah penduduk 4.430 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 2.206 orang, perempuan 2.224 jiwa dan kepala keluarga 1.051 jiwa dengan batas geografis: Utara: Bertepatan laut Flores, Selatan: Rongasolo Kecamatan Wera, di sebelah Barat : Desa Tadewa Kecamatan Wera, dan Timur: Desa Tawali, Kecamatan Wera.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Masyarakat Desa Sangiang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, nelayan, perkebunan, wiraswasta, dan peternakan.

Secara topografi, Desa Sangiang merupakan salah satu dari empat belas (14) desa yang terletak di bagian utara Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 16.424 ha. Iklim di Desa Sangiang tidak berbeda dengan desa lain di wilayah Wera, biasanya terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan Juli hingga Oktober dan musim hujan pada bulan November hingga Februari dengan suhu rata-rata sekitar 35 derajat Celcius, kelembaban udara 30 hingga 33%, sedangkan curah hujan 35 hingga 36 mm dan curah hujan maksimum pada bulan April. Hujan lebat terjadi pada bulan Januari.

Gambar 4.1. Peta Lokasi Desa Sangiang



Sumber : Pemdes Sangiang 2018

Jumlah penduduk Desa Sangiang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Sangiang sebanyak 4.208 jiwa, pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.315 jiwa, dan pada tahun 2018 jumlah penduduk menjadi 4.430 jiwa.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecamatan wera desa sangiang memiliki dusun sebanyak 8 dusun di antara dusun tersebut dusun yang paling luas berada pada dusun lajoro sedangkan dusun yang paling kecil diantara dusun yang ada pada dusun karombo sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di 8 desa tersebut. jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 2.2006 /jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 2.254 jiwa. Berdasarkan kepadatan penduduk dari 8 dusun tersebut dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar berada pada dusun tewo dengan jumlah 723/jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada pada dusun bronjong dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 379/jiwa.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan/Agama

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	4,430	100%
Kristen	0	0%
Katolik	0	0%
Hindu	0	0%
Budha	0	0%
Konghucu	0	0%

Sumber Data : Pemerintah Desa Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan dusun yang ada pada desa sangiang kecamatan wera berdasarkan keyakinan untuk memeluk agama semua dusun secara keseluruhannya atau 100 % menganut agama islam. Hidup dalam suasana tolong menolong dan gotong royong sudah menjadi ritmen kehidupan sehari-hari di desa sangiang. Kebiasaan social itu sering disebut *mboloweki*, yaitu tradisi kumpul bermusyawarah bersama pada saat pra acara sampai pada akhir hajatan. Prinsip kohesi sosial dan masyarakat ibarat saling membantu, bekerja sama menyelesaikan tugas tanpa mengharapkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

1) Rancangan Kerangka Ekonomi Masyarakat Desa

- a. Pendapatan / penghasilan masyarakat desa sangiang dari berbagai sector usaha

Pendapatan perekonomian masyarakat menunjukkan bahwa dari berbagai jenis pekerjaan yaitu pendapatan masyarakat pada sector petani mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 594 orang sedangkan sector nelayan

sebanyak 291 orang, sector buru 243 orang, sector peternakan 242 orang, sector perdagangan 157, sector pegawai swasta 136 orang, sector pegawai negeri sipil 42 orang, sector kuli bangunan sampai dengan sector perekonomian terendah pada pada usaha montir dengan jumlah sebanyak 9 orang. maka dari itu peneliti bisa menyimpulkan dari berbagai pendapatan perkonomian ada pada sector petani dengan jumlah 594 orang dikarenakan luas lahan yang di manfaatkan sangat banyak.

Sistem ekonomi masyarakat terlihat pendapatan perekonomian suatu daerah dari berbagai jenis kegiatan, termasuk pendapatan masyarakat sektor pertanian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 594 jiwa, sedangkan sekitar nelayan sebanyak 291 jiwa, sektor perburuan sebanyak 243 orang, peternakan 242 orang, dunia usaha 157 orang, swasta 136 orang, pemerintahan 42 orang, industri jasa 42 orang, hingga perekonomian. Sektor yang paling rendah di departemen dengan jumlah 9 orang. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan adanya perbedaan pendapatan perekonomian pada sektor pertanian yang berjumlah 594 jiwa, karena wilayah bercocok tanam dan pemanfaatannya sangat luas.

B. Deskripsi Umum Kabupaten Bima

1. Geografis

Kabupaten Bima, bagian dari Provinsi NTB, terletak di ujung timur Provinsi NTB. Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 4.374,65 km² yang terdiri dari 315,96 km² atau 7,22% lahan padi dan 4.058,69 km² atau 92,78% lahan padi. Peningkatan luas areal perkebunan padi ini mengakibatkan berkurangnya

hutan, baik hutan negara maupun hutan lokal. Luas wilayah Kabupaten Bima sekitar 438.940 ha, mencakup 22% luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bima terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 198 desa dan 419 dusun di daerah kabupaten bima. Berdasarkan potensi wilayah Kabupaten Bima pada sensus tahun 2011-2013, Kabupaten Bima terbagi menjadi dua wilayah daratan, yaitu lahan sawah atau ladang dan lahan non sawah. Sawah dibedakan menjadi sawah imigrasi dengan luas 23.626 Ha, sawah tadah hujan dengan luas 10.819 Ha, sawah rawa dengan luas --- Ha, sawah rawa polos dengan luas sawah daerah. luas --- Ha, jadi luas sawahnya adalah 34.445 Ha. Saat ini lahan non sawah terbagi menjadi ladang seluas 73.070 Ha, ladang seluas 13.333 Ha, ladang seluas 9.592 Ha, hutan kota seluas 37.043 Ha, padang rumput seluas 8.772 Ha, dan lahan kosong seluas 17.202 Ha, lahan lainnya seluas 229.324 Ha, kemudian lahan yang bukan sawah seluas 338.336 ha. Meningkatnya areal tanam padi antara tahun 2014 hingga tahun 2016 disebabkan oleh berkurangnya hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat, yang ditanami oleh masyarakat untuk digunakan sebagai tempat bercocok tanam guna menunjang kebutuhannya. Akibat hujan di wilayah Bima, bawang merah tidak bertahan lama dan membusuk. Oleh karena itu, proses penanaman bawang merah biasanya dilakukan pada musim kemarau, sehingga proses pertumbuhan bawang merah akan meningkat drastis. Menurut sumber data Badan Pertahanan Negara (BPN) Kabupaten Bima, tahun 2018 menetapkan luas wilayah Kabupaten Bima berdasarkan luas wilayah adalah 438.940 ha. Di Kabupaten Bima terdapat 18 kecamatan dengan wilayah yang berbeda-beda.

Berdasarkan Sumber data Badan pertahanan nasional (BPN) Kabupaten Bima,2018 menggambarkan tentang luas kabupaten bima yang berdasarkan kecamatan adalah 438.940 Ha.di kabupaten bima terdapat 18 kecamatan, dengan luas wilayah yang berbeda-beda.

Gambar 4.1. Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB



Sumbe Data :BPN Kabupaten Bima, 2017-2018

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data utama: Kependudukan dan Status Perkotaan Kabupaten Bima Tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Bima sebanyak 568.153 jiwa. Jumlah tersebut meliputi 287.257 laki-laki dan 280.895 perempuan, rasio jenis kelamin sekitar 97%. Di wilayah Bima terdapat berbagai sub wilayah yang mencakup wilayah luas dengan jumlah penduduk lebih sedikit, seperti

wilayah Tambora dan wilayah Soromandi. Terdapat beberapa daerah yang luas wilayahnya tapi sempit namun berpenduduk banyak, antara lain: Bolo, Pali Belo dan Belo merupakan wilayah yang paling sempit.

b. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan sumber data Kabupaten Bima, sensus penduduk tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bima sebanyak 568.153 jiwa. Berdasarkan sebaran penduduk di kecamatan tersebut, Kecamatan Bolo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 789,88 jiwa.

c. Komposisi Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bima menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Bima berdasarkan kelompok umur yang berbeda menunjukkan usia 75 tahun memiliki jumlah penduduk sekitar 7.850 jiwa. Saat ini yang terbanyak adalah kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 66.203 jiwa di Kabupaten Bima.

d. Jumlah Pencari Kerja Dikabupaten Bima

Berdasarkan data Pelayanan Kemanusiaan dan Status Perkotaan Kabupaten Bima menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk setiap keluarga di Kabupaten Bima, rata-rata jumlah satu keluarga adalah 3,64 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk per KK terbanyak adalah Kecamatan Madapangga sebesar 3,98 jiwa per KK, disusul Kecamatan Lambitu sebesar 3,97 jiwa per KK, sedangkan kecamatan

dengan jumlah penduduk per KK terendah adalah Pali Belo memiliki sekitar 3,15 orang per keluarga.

e. Jumlah Kepala Keluarga Perkecamatan Di Kabupaten Bima

Berdasarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bima menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk perkk kabupaten bima, rata-rata jumlah per KK adalah 3,64 jiwa. Kecamatan dengan jumlah jiwa perKK, tertinggi adalah kecamatan madapangga adalah sebesar 3,98 jiwa per KK, dengan diikuti kecamatan lambitu sebesar 3,97 perKK, sementara kecamatan dengan jumlah jiwa per KK terkecil adalah kecamatan pali belo sekitar 3,15 jiwa perKK. Ditiap-tiap kecamatan tersebut, memiliki luas wilayah yang berbeda, sehingga area masing-masing wilayah tersebut bisa saja berubah berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di wilayah Bima tercipta melalui pengembangan kawasan strategis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, kawasan strategis yang memiliki kepentingan ekonomi antara lain:

1) Kawasan strategis provinsi di kabupaten bima meliputi:

a. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya banyak mempunyai sektor perikanan (tambak), pariwisata, dan perjalanan.

b. Wilayah Waworada-Sape dan sekitarnya (Kabupaten Sape, Wera, Lambu, Wawo dan Langgudu) mempunyai sektor perikanan, industri dan pertanian

c. Kawasan Pegunungan Tambora

d. Kawasan sekitar Pulau Sangiang

2) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya adalah kawasan strategis warisan budaya yang meliputi:

a. Kompleks Pusat Kebudayaan Wawo

b. Desa adat sambori

c. Desa Adat Mbawa-Donggo

d. Komplek Dana Mbojo-Donggo

e. Situs Wadu Pa'a-Soromandi

3) Bidang strategis kepentingan keselamatan dan keamanan, antara lain:

a. Kawasan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional

b. Kawasan yang diperuntukkan bagi pangkalan militer, kawasan penelitian sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri

c. Ruang lingkup dan organisasi bangunan seputar keselamatan dan keamanan

d. Penentuan jarak keamanan dan keamanan di kawasan keamanan

Ditinjau dari rencana pembagian wilayah laut dan lautan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, wilayah laut

dan perairan Kabupaten Bima terdapat 4 (empat) bagian wilayah pengembangan, terdiri atas:

- a. kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya
- b. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya
- c. wilayah Sape dan sekitarnya
- d. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk membahas tentang Perspektif Sosial Dalam Pilkada di Kabupaten Bima NTB, sebelumnya peneliti berupaya menggambarkan perihal karakteristik informan. Biodata diri pada gambaran terkait kepribadian informan ialah varian jenis kelamin laki-laki, umur, serta profesi dari informan. Adapun informan berjumlah 7 orang terdiri dari masyarakat desa sangiang, kecamatan wera, kabupaten bima.

Berikut ini, peneliti berupaya menjabarkan hasil penelitian akan menghadirkan solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti bertujuan agar mengetahui bentuk perspektif sosial, atas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perspektif sosial terhadap pilkada dan dampak pilkada terhadap perspektif sosial di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

1. Bentuk Perspektif Sosial Terhadap Pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima

a. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh kedewasaan masyarakat dalam arti demokrasi itu akan terlaksana apabila masyarakatnya memiliki kultur politik atau budaya politik yang tinggi, di mana budaya politik

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman masyarakat, dan ketaatan pada regulasi pelaksanaan Pilkada tersebut.

Demokrasi dalam tataran pemahaman masyarakat sangiang masih dalam konteks yang normatif, karena masyarakat sangiang secara garis besar masih mengedepankan hubungan kedekatan kekeluargaan bukan pada substansi dari nilai yang terkandung dalam demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan, masyarakat sangiang juga menyederhanakan demokrasi dengan hanya melihat atas dasar kedekatan bukan pada intervensi pihak lain.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada informen yang berinisial bapak H.U umur (61 tahun) mengatakan bahwa :

“Kalo dilihat dari pengalaman sih apapun yang menjadi pilihan sesuai hati nurani masyarakat, itukan merupakan buah hasil pesta demokrasi yang secara langsung bagi masyarakat serta memberikan hak pilihnya sebagai warga negara yang ikut meramaikan dalam mensukseskan pilkada maupun memeriahkan kompetisi pilkada 1 kali selama 5 tahun” (Hasil wawancara pada 15 Oktober 2019)

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa perspektif sosial masyarakat desa sangiang dalam setiap pelaksanaan demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan hak sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya secara demokrasi, masyarakat menilai dan ikut merasakan sendiri dengan adanya proses demokrasi yang secara langsung tanpa ada unsur paksaan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan antusias serta pemberian hak suara masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang terkandung sesuai amanah UUD 1945. Oleh karena itu, masyarakat diberikan

kebebasan penuh untuk memilih pemimpin daerah yang ikut dalam konstelasi politik, sebab menjadi penentu jalannya demokrasi itu adalah rakyat yang ikut meramaikan dalam menyambut pesta demokrasi dengan riang dan damai.

Selanjutnya, hal diatas senada yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak B.U umur (50 Tahun) mengatakan bahwa :

“Dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang lalu, pemerintah desa tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama Pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara Pemilu tingkat desa (PPS) juga berkantor di kantor desa setempat” (Hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Berdasarkan penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat sangiang memiliki harapan yang tinggi agar pemerintah setempat tidak terlibat dalam politik praktis apalagi mempromosikan calon kandida. Tugas pemerintah mesti mensosialisasikan dan memberikan didikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan selama momentum penyambutan demokrasi yang merugikan dapat bekerja secara efektif dan mencapai visi dan misi yang dirancang dengan baik. Masyarakat dan pemerintah hendaknya dapat bekerjasama dalam pilkada dan mengetahui perannya sebagai anggota dengan berperan penting dalam proses pilkada. Upaya yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan harapan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pemilukada.

b. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah tindakan ikut serta dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat lahir melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting, karena fakta dilapangan saat ini masyarakat memiliki kesadaran yang aktif dalam partisipasi masyarakat khususnya partisipasi politik. Sedangkan masyarakat saat ini telah mengetahui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat sangiang sesuai fakta yang terjadi dilapangan adalah masyarakat menyadari tanggung jawab yang memiliki rasa simpati, empati, dan lebih cenderung terhadap pilkada untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap proses demokratisasi seperti menggunakan hak pilih dan untuk memilih, karena mereka menilai dan sadar jika ikut memilih lebih memberi pengaruh mendasar dari pada tidak memilih atau golput.

Seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak A.I umur (41 Tahun) mengatakan bahwa :

“Masyarakat desa sangiang dalam hasil wawancara dengan informen menerangkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terkait pemilihan kepala daerah, karena kami masyarakat ingin berpartisipasi atas dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain dari pada itu, ditinjau dari faktor pula sehingga kami masyarakat ikut berpartisipasi seperti halnya kesadaran politik, Lokasi TPS, serta kartu pemilih” (Wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat menjelaskan bahwa bentuk partisipasi sosial masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi politik cukup

meningkat dari pilkada kali ini dibanding sebelumnya, karena masyarakat memiliki kesadaran akan partisipasi politik masyarakat sebagai prasarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun suatu daerah yang demokratis pada pemilihan kepala daerah. Untuk itu pemerintah juga perlu membangun sosialisasi disetiap masyarakat agar mereka tetap berpartisipasi pada pemilihan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menjangkau seperti halnya TPS serta masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah.

c. Dinamika Politik Lokal

Dinamika ini berarti bahwa upaya manusia tidak terbatas dalam menghadapi berbagai kekuatan dan tuntutan eksternal dalam suatu masyarakat. Tuntutan perseorangan, tuntutan suatu masyarakat terhadap suatu instansi pemerintah (tingkat tertinggi pemerintahan). Hal-hal tersebut dilakukan secara bergantian tergantung kepentingan masing-masing kelompok yang masih ingin bertindak. Pada tataran sistem politik nasional, tuntutan berbagai kelompok kepentingan harus sejalan dengan konstitusi. Dalam hal ini hal-hal tersebut menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak mengganggu negara, atau merusak sistem politik, ekonomi, dan hukum, namun hal-hal yang diinginkan adalah membangun kembali sistem politik dan sistem perekonomian sehingga tidak muncul. Konflik di masyarakat.

Dinamika politik kian dinamis dalam keterlibatan masyarakat sangiang yang sebagian besar masyarakat sudah lebih paham soal politik dan selalu diperhadapkan dalam setiap ajang politik yang hanya mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan. Namun, bagi masyarakat sangiang itu hal yang wajar dalam politik yang

terpenting tetap lebih mengedepankan kedekatan keluarga dari pada terlalu ikut andil mengambil peran dalam politik. Disisi lain, terkadang dinamika politik juga mengalami tidak stabil atau saling menghujat karena ada faktor menjadi perbedaan pilihan yang sesuai dengan kondisi ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak H.J umur (46 tahun) mengatakan bahwa :

“Memang dinamika politik itu begitu kencang dan masyarakat selalu menjadi subjek politiknya. Politik juga merupakan suatu seni untuk melakukan segala kemungkinan. Maka tak heran, bila hari ini kawan besok menjadi lawan ataupun sebaliknya. Bila hari ini mendukung A, besok bisa jadi menolak. Namun politik juga harus beretika, etikanya adalah tetap berpihak kepada kebenaran. Jadi manuver dalam berpolitik memang sah-sah, karena politik juga sebuah seni. Seni untuk mempengaruhi dan menguasai serta mempertahankan kekuasaan” (Wawancara tanggal 19 Oktober 2019).

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa dinamika politik yang terjadi dikalangan masyarakat terkadang stabil dan tidaknya disebabkan kondisi sosial karena adanya faktor perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, sehingga ditengah kontestasi politik dalam momentum menyambut demokrasi melahirkan kondisi yang sedikit pro dan kontrak antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini karena tingkat antusias dari masing-masing pendukung serta kesadaran politik masyarakat dalam memberikan hak politik yang mereka lihat sendiri dan menilai dari seluk beluk pasangan calon yang dipilih. Oleh karena itu, masyarakat selalu

menjadi subjek dan target politik bagi para elit politik dalam mempertahankan kekuasaan.

d. Faktor sosok calon / ketokohan

Masyarakat sangat mengharapkan kepada sosok calon yang berjiwa sosial dan memiliki hubungan kedekatan emosional dengan masyarakat, ketokohnya, serta rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, bukan saja disaat momentum pilkada saja tetapi harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Sebab harapan serta keinginan masyarakat bima pada umumnya adalah menjemput perubahan baik pada sektor sumber daya manusia, infrastruktur, perekonomian, pemberdayaan, serta lebih-lebih sektor pertanian sesuai visi dan misi serta program unggulan dari calon tersebut.

Sehubungan dengan adanya Pilkada, masyarakat desa sangiang awalnya tentu melihat dan menilai terlebih dahulu dari segi latar belakang calon itu seperti apa bukan saja pada masyarakat sangiang tetapi semua masyarakat yang ikut terlibat dalam pemilihan, karena ditengah kehidupan masyarakat penuh dengan pandangan yang berbeda bahkan pemilih yang terbiasa ikut dipemilihan sebelumnya belum tentu memilih calon yang bersamaan ikut kemarin sebab bisa jadi masyarakat rubah haluan dengan sekejap memilih yang lain. Artinya masyarakat telah di babak beluk dengan pilkada sehingga mereka tak heran bahwa sebelum dipromosikan para calon tertentu mereka sudah sedikit paham mana calon yang beramanah dan bisa dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Seperti yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak T umur (60 tahun) mengatakan bahwa :

“Ya, dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kami masyarakat mengharapkan serta memiliki keinginan besar terhadap pasangan calon agar bisa membantu untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial” (Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2019)

Dari penjelasan diatas, dapat menjelaskan bahwa dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masyarakat banyak menaruh harapan besar serta keinginan kepada calon pemimpin kepala daerah yang akan terpilih, agar bisa mewujudkan berdasarkan visi dan misi melalui program kerja atau janji politik yang mereka programkan. Sesuai dengan tujuan dan fungsi Pilkada berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Negara, sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat, sarana untuk membentuk perwakilan politik serta sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.

Berdasarkan hasil observasi yang berhubungan langsung tentang proses pelaksanaan Pilkada, peneliti melihat sesuai hasil pengamatan bahwa masyarakat pada umumnya ikut meramaikan dan memeriahkan disaat menyambut pilkada dengan kedatangan melalui kunjungan dari sosok para calon kandidat masing-masing dalam mensosialisasikan serta tetap saling menjaga hubungan emosional demi mempererat tali silaturahmi ditengah aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak MH umur (58 Tahun) mengatakan bahwa :

“Sebelum dilaksanakan itu Pilkada, pertama tentu kami melihat dulu latar belakang calon yang akan kami pilih nantinya dari sekian calon yang ikut menjadi kandidat, kami pun juga menyiapkan strategi politik sehingga kami bisa melakukan konsolidasi agar bisa mensosialisasikan pasangan calon yang kami usul, selain dari pada itu kami pun melakukan pengawasan/pengontrolan terhadap massa yang kami himpun” (Wawancara tanggal 20 Oktober 2019)

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa antusiasnya masyarakat dalam hal persiapan menyambut proses pelaksanaan Pilkada, masyarakat juga tentu menilai dan melihat sosok calon dari sekian kandidat yang ikut dalam kontestasi pilkada tersebut. Tingkat partisipasi politik masyarakat bisa diukur apabila masyarakatnya pro aktif dalam melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap pasangan calon yang akan diperjuangkan bersamanya. Disamping itu, masyarakat pun juga ikut andil melakukan sosialisasi dengan sebuah strategi politik yang sudah dicanangkan bersama timses maupun pasangan calon tersebut.

2. Dampak Pilkada Terhadap Perspektif Sosial di Desa Sangiang Kabupaten

Bima

a. Dampak Positif

1) Merubah sifat pasif sehingga aktif

Di sisi lain, dampak positif pilkada ialah mengubah perilaku masyarakat dari mencalonkan diri menjadi bekerja, hal ini disebabkan oleh kesadaran individu atau masyarakat desa sangiang terlibat dalam pemilihan bupati atau wakil daerah, faktor lain yang membuat masyarakat lebih aktif dalam pilkada adalah adanya penegasan dari pihak keluarga kepada orang tersebut bahwa belum dihadirkan layak untuk ikut serta dalam politik dan

pemilihan kepala daerah karena orang tersebut masih tumbuh. Hal ini membuat masyarakat Sangiang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut sesuai tujuannya, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang dikatakan oleh informen berinisial bapak H.U umur (61 Tahun) mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat termotifasi karena ada rasa keingintahuan serta keikutsertaan dalam pelaksanaan Pilkada, kami juga merasakan secara langsung ikut terlibat dalam hal kesadaran politik seperti melihat sosok calon yang dianggap baik serta beramanah, dan lebih-lebih melihat visi dan misi para calon” (Wawancara tanggal 22 Oktober 2019)

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa Pemilih yang tadinya hanya sekedar pengamat proses politik, kini menjadi aktor atau pemilih yang akan menentukan pemilihan kepala daerah. Di sinilah rasa penasaran masyarakat terhadap ide bergabung dengan partai demokrasi dan keinginan untuk mendapatkan masukan dalam pilkada, sedangkan kesadaran politik masyarakat di desa sangiang sudah banyak yang paham serta mempunyai keinginan bahwa mereka harus mensukseskan Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan untuk membawa ke arah yang lebih baik. Kenyataan ini menyebabkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan, khususnya disaat hasil pemungutan suara. Maka partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan kepala daerah dikategorikan dalam kelompok spektator dengan tingkat kesadaran politik mereka meningkat walaupun hanya sekedar ikut dalam kegiatan pemilihan. Oleh sebab itu, masyarakat juga menilai dengan adanya sosok calon

merupakan kebebasan penuh untuk memilih dan dipilih serta menentukan pemimpin tanpa intimidasi dari pihak manapun, hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat desa sangiang.

2) Meningkatkan Kohesi Internal Dalam Kelompok

Solidaritas merupakan suatu alat yang digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat untuk mempersatukan persaudaraan antar anggota kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dengan dilaksanakannya pilkada dapat tercipta persatuan untuk lebih memahami keadaan antar anggota, selain itu juga dapat saling membantu antar kelompok. Setelah pilkada dilaksanakan secara kelompok yang memiliki tujuan yang sama, kelompok tersebut bekerja sama untuk berdiskusi atau menyusun strategi untuk mencapai kemenangan bagi kedua kelompok.

b. Dampak Negatif

1) Kurang erat hubungan kekerabatan

Pemilihan pemimpin daerah khususnya di desa sangiang disebabkan oleh perbedaan dan munculnya fanatik dari masing-masing pendukung, serta menimbulkan persaingan dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Dampak yang cukup signifikan berkaitan dengan pilkada ialah masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya sangat antusias karena pilkada beda dengan pemilihan lain, artinya tingkat pro aktif mereka sangat signifikan untuk memilih calon pemimpin daerahnya dan itu merupakan sebuah perwujudan dalam amandemen UU pemilu yang menganjurkan pro aktif masyarakat dalam memilih

dan menghindari golput. Dalam pilkada pun tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktif tim sukses sebagai ujung tombak pemenangan calon itu sangat berpengaruh dalam pilkada dan mereka pula ikut andil dalam mensosialisasikan pilkada damai.

Seperti yang dikatakan oleh informen yang berinisial bapak B.U umur (50 Tahun) mengatakan bahwa :

“Bermunculnya banyak perpecahan di antara masyarakat awam yang dipelintir oleh oknum atau sekelompok yang memiliki kepentingan, dalam artian masyarakat sering dijadikan korban, namun dalam sisi lain perpecahan hanya sebatas dinamika yang masih wajar” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2019)

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa pilkada adalah salah satu proses demokrasi yang sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan masyarakat secara langsung, lewat prosesi dan momentum pilkada banyak masyarakat yang saling hujat hingga tak ayal banyak melahirkan konflik ditengah masyarakat sendiri. Pemetaan dan perkubuan akan nampak namun ditingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, disamping itu pula banyak sekali konflik internal yang muncul seperti halnya interfensi oleh petahana kepada lembaga-lembaga yang seharusnya tidak bisa dimasuki oleh politik. Misalnya para kepala sekolah, ASN, dan bahkan penyelenggara itu sendiri tidak lepas dari tekanan yang seharusnya mereka dituntut untuk bersifat netral.

2) Penyebab konflik dalam lingkungan keluarga

Konflik merupakan pergulatan antara individu dan kelompok untuk mencapai apa yang sama-sama ingin dicapai. Dimana kemenangan dan kehancuran pihak musuh merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh lawan.

Perselisihan intra keluarga yang muncul pada pemilihan Bupati di kecamatan wera Desa Sangiang dilatar belakangi oleh perbedaan pemilihan calon bupati.

Pernyataan diatas seperti hasil wawancara oleh informen yang berinisial bapak S umur (37 Tahun) mengatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya, kondisi sosial masyarakat itu sering kali terjadi karena kesibukan kegiatan pribadinya, kami juga kadang lebih memilih mengurus kegiatan sendiri ketimbang urusan pemilih sebab, urusan politik kadang yang berhak dan di istimewa hanya orang-orang kaya ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik” (Wawancara tanggal 27 Oktober 2019)

Dari penjelasan informen diatas, dapat menjelaskan bahwa kesibukan kegiatan sehari-hari, Peranan masyarakat yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan dikarenakan mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka dari pada harus ikut serta dalam urusan pemilih. Keikutsertaan masyarakat dalam dunia politik adalah suatu hal yang istimewa, sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

B. Pembahasan

1. Bentuk perspektif sosial terhadap pilkada di Desa Sangiang

Perspektif sosial merupakan sekumpulan pemikiran dan keyakinan mengenai sesuatu, mengharapkan masyarakat melihat sesuatu dengan cara

tertentu. Imajinasi atau perspektif menuntun setiap orang untuk mengetahui bagian penting dari suatu hal yang dipilih dari beberapa sudut pandang untuk dipertimbangkan secara logis. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ide adalah proses berpikir, prinsip dan gagasan yang mempengaruhi pemikiran manusia secara kreatif dalam situasi tertentu.

Dari segi hubungan sosial juga mempunyai cara pandang yang melihat pada struktur sosial berdasarkan cara berpikir, prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang melingkupi struktur sosial tersebut, sehingga menjadi suatu konsep pendekatan atau kadang disebut metode sosiologi studi sosial. Dari sudut pandang ini, secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang atau masyarakat selalu berubah, namun ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan sepenuhnya dan cara hidup baru ini akan terus berlanjut meskipun tidak hanya secara sederhana, hingga perubahan terbaru. Selain itu, teori ini menekankan bahwa masyarakat sebagai suatu tubuh atau kehidupan mengalami proses pemisahan dan integrasi.

Bentuk perspektif sosial masyarakat desa sangiang dalam setiap pelaksanaan demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan hak sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya secara demokrasi, masyarakat menilai dan ikut merasakan sendiri dengan adanya proses demokrasi yang secara langsung tanpa ada unsur paksaan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan antusias serta pemberian hak suara masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi. Tingkat partisipasi politik Masyarakat desa sangiang cukup meningkat dari pilkada kali ini dibanding sebelumnya, karena masyarakat

memiliki kesadaran akan partisipasi politik masyarakat sebagai prasarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun suatu daerah yang demokratis pada pemilihan kepala daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan daerah dan wakil pimpinan daerah mempunyai peranan penting yang strategis dalam pembangunan kehidupan demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat, menjaga keharmonisan hubungan antar pemerintah daerah dan antar daerah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memerlukan pemimpin daerah dan wakil kepala daerah yang mampu berinovasi, menatap masa depan dan siap berubah ke arah yang lebih baik.

Masyarakat dan pemerintah hendaknya dapat bekerja sama dalam pilkada dan mengetahui perannya sebagai anggota dengan berperan penting dalam proses pilkada. Namun, dinamika politik dikalangan masyarakat terkadang stabil dan tidaknya disebabkan kondisi sosial karena adanya perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, sehingga ditengah kontestasi politik dalam momentum penyambutan pesta demokrasi melahirkan kondisi yang pro dan kontrak antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Upaya yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan harapan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pilkada.

Sehingga kemudian selaras dengan teori perilaku sosial menyatakan bahwa segala perilaku yang dilakukan manusia dapat dianggap sebagai perilaku

sosial apabila perilaku yang diberikan dapat mempertimbangkan perilaku orang lain dan didasarkan pada perilaku di tempat lain yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan realitas perspektif sosial terhadap pilkada di desa sangiang dari berbagai hasil temuan dan observasi lokasi penelitian. Selanjutnya dalam kajian teori struktural fungsional memandang bahwa dalam masyarakat mempunyai struktur atau susunan yang mempunyai fungsi masing-masing, kemudian sinkron dengan perspektif sosial dalam pilkada.

2. Dampak Pilkada Terhadap Perspektif Sosial di Desa sangiang

Dampak positif pilkada adalah pada prinsip satu orang satu suara yang mendekati prinsip demokrasi. Prinsip ini tidak dapat dihormati oleh agen sistem apa pun. Oleh karena itu, terpilihnya pemimpin daerah akan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mempunyai pemimpin lokal dalam urusan ketenagakerjaan.

Di tingkat daerah, pemilihan pemimpin daerah (walikota, bupati, wakil bupati) merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai baik serta tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dampak dari terselenggaranya pilkada ini adalah masyarakat mempunyai peluang besar untuk berdemokrasi, pemimpin daerah mempunyai kekuasaan yang baik, serta adanya visi dan platform informasi bagi pemimpin daerah yang akan menjadi landasan dalam perencanaan daerah. Namun fenomena lemahnya pelayanan publik dan otonomi daerah tidak lepas dari kebijakan pemilih daerah pasca konflik. Memang jumlahnya tidak besar jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan dasar dan

pelayanan kesehatan, namun yang belum dipahami masyarakat adalah bagaimana memanfaatkan APBD yang seharusnya untuk daerah dalam menutupi biaya politik dan seleksi.

Disisi lain, dampak positif dari pemilihan kepala daerah adalah mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi aktif, hal tersebut diakibatkan adanya kesadaran individu atau masyarakat desa sangiang untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan pemilihan bupati, kemudian indikator lain yang menyebabkan masyarakat sangiang aktif pada pemilihan kepala daerah. Dari sini rasa keingintahuan masyarakat untuk keikutsertaan dalam pesta demokrasi serta ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pilkada, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat di desa sangiang sudah banyak yang paham serta mempunyai keinginan bahwa mereka harus mensukseskan Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan untuk membawa ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, masyarakat juga menilai dengan adanya sosok calon merupakan kebebasan penuh untuk memilih dan dipilih serta menentukan pemimpin tanpa intimidasi dari pihak manapun, hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat desa sangiang.

Dampak negatif dari pilkada langsung terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan adalah pertama tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pilkada melalui APBD sebagai akibat politik uang (money politics) yang dilakukan selama proses pilkada langsung. Upaya untuk menarik simpati, biaya iklan, biaya mendaftar pada partai politik pengusung, menyebabkan ongkos pemilukada langsung bagi calon.

Pemilihan kepala daerah khususnya di desa sangiang berdampak pada renggangnya hubungan kekerabatan disebabkan oleh perbedaan dan munculnya fanatik dari masing-masing pendukung, adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya persaingan di dalam masyarakat, sehingga konflik antar hubungan dalam masyarakat kurang erat. Lewat prosesi dan momentum pilkada banyak masyarakat yang saling hujat hingga tak ayal banyak melahirkan konflik ditengah masyarakat sendiri. Pemetaan dan perkubuan akan nampak namun ditingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, disamping itu pula banyak sekali konflik internal yang muncul seperti halnya interfensi oleh petahana kepada lembaga-lembaga yang seharusnya tidak bisa dimasuki oleh politik.

Hal ini selaras dengan teori tindakan sosial bahwa segala tindakan manusia dapat dianggap sebagai perilaku sosial apabila perilaku yang diberikan dapat mempertimbangkan perilaku orang lain dan didasarkan pada perilaku orang lain dalam tubuh kelompok. Hal ini sesuai dengan realitas dampak pilkada terhadap perspektif sosial di desa sangiang dari berbagai hasil temuan dan observasi lokasi penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sangiang, maka peneliti bisa menyimpulkan dari hasil penelitian tentang “Perspektif Sosial Dalam Pilkada di Desa Sangiang Kabupaten Bima” sebagai berikut :

1. Bentuk perspektif sosial masyarakat desa sangiang dalam setiap pelaksanaan demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan hak sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya secara demokrasi, masyarakat menilai dan ikut merasakan sendiri dengan adanya proses demokrasi yang secara langsung tanpa ada unsur paksaan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan antusias serta pemberian hak suara masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi. Tingkat partisipasi politik masyarakat desa sangiang cukup meningkat dari pilkada kali ini dibanding sebelumnya, karena masyarakat memiliki kesadaran akan partisipasi politik masyarakat sebagai prasarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun suatu daerah yang demokratis pada pemilihan kepala daerah.
2. Dampak pilkada terhadap perspektif sosial di Desa sangiang sesuai hasil penelitian bahwa ada 2 dampak yang terjadi, antara lain; Pertama, dampak positif pilkada merubah perilaku masyarakat dari yang lemah menjadi aktif, hal ini disebabkan karena ada kesadaran individu atau masyarakat desa sangiang ikut serta dalam pemilihan, kemudian ada hal lain yang

menunjukkan bahwa masyarakat sangiang aktif pada pemilihan pemimpin daerah. Kedua, dampak negatif menunjukkan salah satu proses demokrasi yang sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan masyarakat secara langsung, lewat prosesi dan momentum pilkada banyak masyarakat yang saling hujat hingga tak ayal banyak pemetaan dan perkubuan akan nampak ditingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti sendiri ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut ;

1. Bagi masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera pada umumnya, peneliti berharap agar di pemilihan kepala daerah bisa dijadikan acuan atau landasan sebagai pemilih yang rasionalitas, jujur, santun, serta damai dalam Pilkada.
2. Kami berharap para calon pemimpin daerah tidak mengambil jalan pintas, terutama dengan ikut serta dalam kebijakan keuangan negara yang akan terpilih menjadi pemimpin daerah.
3. Bagi pemerintah, para pengamat berharap dapat memberikan sanksi yang berat kepada para pemimpin di berbagai daerah, dalam hal ini penyelenggara pilkada, karena mereka bekerja sesuai dengan undang-undang, tanpa bantuan pihak manapun untuk mempertahankan kekuatan reputasi dan kredibilitas mereka.
4. Peneliti sendiri menyarankan agar para ilmuwan dapat mengembangkan penelitian ini untuk memberikan solusi dengan tujuan menyelesaikan konflik terkait pilkada dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H Rozalli, 2005. *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta: Raja Gravido persada.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005, hlm. 31
- Almond, Gabriel A. Dan Sidney Verba (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Terjemahan. Sahat Simamora*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badrul Munir. *Strategi Marketing Mix Dalam Kampanye Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah*. Kota Yogyakarta: 2011.
- Creswell, Jhon W (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Eko Prasojjo, *Bad Governance Salah Satu Ekses Pilkada*, Jawa Pos, Selasa, 10 Februari 2009.
- <http://www.bhataramedia.com/forum/sebutkan-dan-jelaskan-asas-pemilu/diakses> pada tanggal 21 agustus pukul 19.24
- J. W. Batawi, *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010)*, Jurnal UNIERA, Volume 2 Nomor 2; aagustus 2013. hlm 32.
- Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), hlm 209.
- Kumorotomo, 2010. *Pilkada Langsung. 2004. Melayani Kepentingan Parpol: Masalah Fragmentasi dan Akuntabilitas Dalam Perumusan Kebijakan Di Daerah, 2010*. Analisis CSIS.
- Khairul Afif B.P. *Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Politik Kiai Cholil As'ad Syamsul Arifin Dalam Pemilihan Gubernur*. Jawa Timur: 2013.
- Leli Salman Al-Fairi, “ *Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung: sebuah pilihan model pemerintahan daerah demokratis*”. *Jurnal Aspirasi*. *ejournal. unwir.ac. id/file.php? file= jurnal&id=490&cd.name=leli_salman.pdf* diakses pada tanggal 21 agustus pukul 20.36

- Manor, J. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. New York, World Bank Publication. 1999.
- Marijan, Kancung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Miles & Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nopyandri, *pemilihan kepala daerah yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945, Vol2 No.2, Jurnal Ilmu Hukum, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1151>*. diakses pada 13 agustus 2017 pukul 9.13.
- Prihatmoko, 2003. *Men-demokratis-kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. LP3M Un-Wahas dan Pustaka Pelajar, Semarang.
- Roni Lukman, *Pilkada dan Implikasinya terhadap Perubahan perilaku masyarakat dalam menuju pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal UNG. <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/78/PILKADA-LANGSUNG-DAN-IMPLIKASINYATERHADAP-PERUBAHAN-PERILAKU-MASYARAKAT-DALAM-MENUJU-PEMBANGUNANDEMOKRASI-DI-INDONESIA>*. pdf, hlm 2 diakses pada 15 agustus 2017 pukul 11.18
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman. *Strategi Komunikasi Politik caleg dalam kemenangan pemilu (studi kualitatif partai Golkar JATENG dalam pemilu legislatif*. 2014
- Syamsul Hadi Thubany, *Pilkada BIMA 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*, (Yogyakarta: 2005), hlm 8.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 1*
- undang-undang No 8 tahun 2015 pasal 5 ayat 1- 4*
- undang-undang Nomor 8 tahun 2015, pasal 57 ayat 1-4*

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Iwan setiawan
Nim : 10538293014
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	7 %	10%
6	Bab 6	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Oktober 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Iwan setiawan 10538293014

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200359766

File name: BAB_I_iwan.docx (26.34K)

Word count: 1710

Character count: 11650

Iwan setiawan 10538293014 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	kuswan.wordpress.com Internet Source	2%
3	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Iwan setiawan 10538293014

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200360540

File name: BAB_II_Iwan.docx (57.93K)

Word count: 3513

Character count: 23662

Iwan setiawan 10538293014 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24% **LULUS** **24%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	11%
2	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	5%
3	faisaljufri.blogspot.com Internet Source	3%
4	mkri.id Internet Source	3%
5	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Iwan setiawan 10538293014

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200361092

File name: BAB_III_iwan.docx (24.07K)

Word count: 1454

Character count: 9864

Iwan setiawan 10538293014 BAB III

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

12% PUBLICATIONS

7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	ojs.uho.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	Hemy Kiswinarso, Muhammad Hanif. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2000-2015", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Publication	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Iwan setiawan 10538293014

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200361554

File name: BAB_IV_iwan.docx (525.24K)

Word count: 1942

Character count: 11708

Iwan setiawan 10538293014 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS	10%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
3	pdfcookie.com Internet Source	2%
4	www.desa-maria.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Iwan setiawan 10538293014

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200362110


File name: BAB_V_iwan.docx (33.98K)

Word count: 3618

Character count: 24196

Iwan setiawan 10538293014 BAB V

ORIGINALITY REPORT

7 %		0 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.uho.ac.id Internet Source	2 %
2	es.scribd.com Internet Source	2 %
3	repository.unib.ac.id Internet Source	2 %
4	media.neliti.com Internet Source	2 %

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Iwan setiawan 10538293014

BAB VI

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200363014

File name: BAB_VI_iwan.docx (17.85K)

Word count: 374

Character count: 2425

Iwan setiawan 10538293014 BAB VI

ORIGINALITY REPORT

4%  **4%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1

eprints.kwikkiangje.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3.muhammadiyah@plasma.com



Nomor : 222/05/C.4-VIII/X/40/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Safar 1441 H
01 October 2019 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Bupati Bima
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Bima

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1149/FKIP/A.II/IX/1441/2019 tanggal 30 September 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IWAN SETIAWAN
No. Stambuk : 10538 2930 14
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Perspektif Sosial dalam Pilkada di Kabupaten Bima"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Oktober 2019 s/d 8 Desember 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Bima, 11 Oktober 2019

Nomor : 070/353/003/X/2019
Lampiran : --
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bima
di-

R a b a

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah makassar, Nomor : 222/05/C.4-VIII/X/40/2019, Tanggal 01 Oktober 2019. Perihal : Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **IWAN SETIAWAN**
NIM : 10538 2930 14
Program Study/Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul penelitian "**PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PILKADA DI KABUPATEN BIMA.**" dari tanggal 11 Oktober s/d 11 Desember 2019 yang berlokasi di **KABUPATEN BIMA.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian.

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BIMA
Kabid. Pengkajian Masalah Strategis dan
Penanganan Konflik,


MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.197905262006041016

TEMBUSAN : disampaikan kepada
Yang bersangkutan di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 11 Oktober 2019

Nomor : 050.7/932/07.1/2019
Lamp. : -
Perihal : *Ijin Penelitian dan Survei*

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Kab. Bima
2. Kepala Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima
Masing-masing

di -
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan KESBANG POLITIK An. Kabid Pengkajian Masalah Strategis & Penanganan Konflik Kab. Bima Nomor : 070/353/003/v/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survey kepada:

Nama : IWAN SETIAWAN
Nim : 10538 2930 14
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas/ Jurusan : Pend. Sosiologi
Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei
Judul : Perspektif Sosial Dalam Pilkada Di Kab. Bima
Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Bulan dari Tanggal 11 Oktober s/d 10 Desember 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang

Ruvaidah, ST., MT
 NIP 1972021220022008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. BAWASLU Kab. Bima di Tempat
2. Camat Wera Kab. Bima di Tempat
3. Dekan Fakul. Keguruan & Ilmu Pendidikan Prog. Pend. Sosiologi Univ. Muhammadiyah Makassar di Tempat
4. Sdr. IWAN SETIAWAN Tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WERA**

Yn. Lintas Wera – Bima

Kode Pos. 84152

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN DAN SURVEY

Nomor : 050/ 842 /04.D.Pem/2019

Berdasarkan surat BAPPEDA Kabupaten Bima tanggal 11 Oktober 2019 Nomor : 050.7/932/07.1/2019 perihal Ijin Penelitian dan Survei, dengan ini kami memberikan Rekomendasi ijin penelitian kepada :

N a m a	: IWAN SETIAWAN
NIM	: 10538 2930 14
Universitas	: Muhammadiyah Makassar
Fakultas/Jurusan	: Pendidikan Sosiologi
Tujuan/Keperluan	: Mengadakan Penelitian dan Survei
Judul	: Perspektif Sosial dalam Pilkada di Kab. Bima
Lamanya	: 2 (dua) bulan dari tanggal 11 Okt. s/d 10 Des. 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa kami berprinsip mendukung sepenuhnya dan memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Penelitian dan Survei dengan judul tersebut diatas.

Demikian rekomendasi penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawali, 15 Oktober 2019

An. Camat Wera,
Sekcam



H. ILHAM SH
Penata TK. I (III/d)

NIP. 19671231 200604 1 193

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bima di Bima
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima di Raba
3. Yth. Dekan FKIP Prog. Pend. Sosiologi Univ. Muhammadiyah Makassar di Tempat
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bima di Panda
5. Yth. Kepala Desa Sangiang di Sangiang
6. Sdr. Iwan Setiawan di Tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WERA
KANTOR DESA SANGIANG**

Alamat : Jl. Pelabuhan Sangiang email : pesonasangiang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : Pem./17.2/602/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sangiang kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Menerangkan :

Nama : Iwan Setiawan
NIM : 10538293014
FAKULTAS : FKIP
Lembaga/Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada

Perspektif Sosial dalam Pilkada Desa Sangaing Kecamatan Wera Kabupaten Bima tanggal 11 Oktober s/d tanggal 14 November 2019, dengan judul Perspektif Sosial Dalam Pilkada Kabupaten Bima.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangiang, 16 November 2019
KEPALA DESA SANGIANG

A. RASID H. IMRAN, SE
NIP. 20190128 19687.7.1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : IWAN SETIAWAN
Stambuk : 10538 2930 14
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.
Judul Proposal : Perspektif Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima

Konsultansi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	19/10-19	- judulnya di-teliti dgn lebih ilera	
2.	20/10-19	- Paragraf masalahnya	
3.	4/11-19	- esensi	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM. 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **IWAN SETIAWAN**
Stambuk : 10538 2930 14
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Lukman Ismail, S.Pd. M.Pd.**
Judul Proposal : **Perspektif Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima**

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	15/8/19	beta Balakay	
	29/8/19	Kejira pustaka	
	2/9/19	Membeli Penelitian	
	5/9/19	Ace	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui,

Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM. 575 474



Terakreditasi Institusi

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : H. Uprin
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

2. Nama : Busman
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Staf Kaur Desa

3. Nama : Andi Irawan
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani

4. Nama : H. Jamaludin
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

5. Nama : Taofik
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani

6. Nama : Muliadin Hamza

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Tukang Batu

7. Nama : Syahril

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani

DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut bapak apakah demokrasi secara langsung di Desa sangiang berjalan sesuai aturan yang berlaku ?
2. Apakah pemerintah Desa Sangiang ikut serta dalam penyelenggara pemilukada yang berlangsung ?
3. Apakah perspektif masyarakat Desa Sangiang dalam berpartisipasi mensukseskan pemilukada ini ?
4. Menurut Perspektif bapak dinamika politik seperti apa yang terjadi di Desa Sangiang ?
5. Apa harapan bapak terhadap calon yang nanti akan menjadi kepala daerah ?
6. Apakah bapak menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang mampu membangun daerah ini ?
7. Apa yang bapak rasakan disaat proses mengikuti pilkada ini ?
8. Apakah ada konflik yang terjadi dalam dinamika politik di Desa Sangiang ?
9. Apakah bapak menggunakan hak pilih dalam pilkada ini ?

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama : H. Uprin Umur : 61 Tahun Pekerjaan : Wirausaha	1. Menurut bapak apakah demokrasi secara langsung di Desa Sangiang berjalan sesuai aturan yang berlaku ?	Kalo dilihat dari pengalaman sih apapun yang menjadi pilihan sesuai hati nurani masyarakat, itukan merupakan buah hasil pesta demokrasi yang secara langsung bagi masyarakat serta memberikan hak pilihnya sebagai warga negara yang ikut meramaikan dalam mensukseskan pilkada maupun memeriahkan kompetisi pilkada 1 kali selama 5 tahun.
		2. Apa yang bapak yang rasakan setelah mengikuti pilkada ini ?	Kami sebagai masyarakat termotivasi karena ada rasa keingintahuan serta keikutsertaan dalam pelaksanaan pilkada, kami juga merasakan langsung ikut terlibat dalam hal kesadaran politik seperti melihat sosok calon yang dianggap baik serta beramanah, dan lebih-lebih melihat visi dan misi para calon.
2	Nama : Busman Umur : 50 Tahun Pekerjaan : Staf Kaur Desa	1. Apakah pemerintah Desa Sangiang ikut serta dalam penyelenggara pemilukada berlangsung ?	Dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang lalu, pemerintah desa tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara pemilu tingkat desa juga berkantor di kantor desa setempat.

		2. Apakah ada konflik yang terjadi dalam dinamika politik di Desa Sangiang ?	Bermunculnya banyak perpecahan di antara masyarakat awam yang dipelintir oleh oknum atau sekelompok yang memiliki kepentingan, dalam artian masyarakat sering dijadikan korban, namun dalam sisi lain perpecahan hanya sebatas dinamika yang masih wajar ?
3	Nama : Andi Irawan Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Petani	1. Apakah perspektif masyarakat Desa Sangiang dalam berpartisipasi mensukseskan pemilukada ini ?	Masyarakat desa sangiang dalam hasil wawancara dengan informan menerangkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terkait pemilihan kepala daerah, karena kami ingin berpartisipasi atas dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain dari pada itu, ditinjau dari faktor pula sehingga sehingga kami masyarakat ikut berpartisipasi seperti halnya kesadaran politik, lokasi TPS, serta kartu pemilih.
4	Nama : H. Jamaludin Umur : 46 Tahun Pekerjaan : Wirausaha	1. Menurut perspektif bapak dinamika politik seperti apa yang terjadi di Desa Sangiang ?	Memang dinamika politik itu begitu kencang dan masyarakat selalu menjadi subjek politiknya. Politik juga merupakan suatu seni untuk melakukan segala kemungkinan. Maka tak heran, bila hari ini kawan besok menjadi lawan ataupun sebaliknya. Bila hari ini mendukung A, besok bisa jadi menolak. Namun politik juga harus beretika, etikanya adalah tetap berpihak kepada kebenaran. Jadi manuver dalam berpolitik memang sah-sah, karena politik juga sebuah seni. Seni untuk mempengaruhi dan menguasai serta mempertahankan kekuasaan.
5	Nama : Taofik	1. Apa harapan bapak terhadap calon yang	Ya, dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kami masyarakat mengharapkan

	Umur : 60 Tahun Pekerjaan : Petani	nanti akan menjadi kepala daerah ?	serta memiliki keinginan besar terhadap pasangan calon agar bisa membantu untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial.
6	Nama : Muliadin Hamza Umur : 58 Tahun Pekerjaan : Tukang batu	1. Apakah bapak menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang mampu membangun daerah ini ?	Ya, dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kami masyarakat mengharapkan serta memiliki keinginan besar terhadap pasangan calon agar bisa membantu untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial.
7	Nama : Syahril Umur : 37 Tahun Pekerjaan : Petani	1. Apakah bapak menggunakan hak pilih dalam pilkada ini ?	Sepengetahuan saya, kondisi sosial masyarakat itu sering kali terjadi karena kesibukan kegiatan pribadinya, kami juga kadang lebih memilih mengurus kegiatan sendiri ketimbang urusan pemilih sebab, urusan politik kadang yang berhak dan di istimewa hanya orang-orang kaya ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

DOKUMENTASI



Gambar : Hasil Observasi Lokasi Kantor Desa Sangiang



Gambar : Posko Central Comando Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Operator Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Ketua Karan Taruna Desa sangiang



Gambar : Duduk Bersama Dengan Para Pemuda Desa Sangiang



RIWAYAT HIDUP



Iwan Setiawan. Lahir di Desa Sangiang, pada tanggal 03 Juli 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bapak H. Jamaludin dan Ibu Nurma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sangiang mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Wera dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Wera dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 penulis berhasil lulus pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan. Selama masa pendidikan penulis mengikuti beberapa organisasi eksternal dan pertama kali ikut sejak 2014 yaitu organisasi Gerakan Mahasiswa Sangiang (GERMAS) Bima-Makassar dan pernah menjabat sebagai (Ketua Umum Periode 2016-2017), Himpunan Mahasiswa Wera (HMW) Bima-Makassar (Dewan Penasehat Lembaga 2017-2018), Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Mantan Pengurus Pusat Periode 2016-2017. Dan alhamdulillah sekarang ini telah berhasil menyusun tugas akhir dengan judul; “PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PILKADA DI KABUPATEN BIMA”

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Iwan setiawan
Nim : 10538293014
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	7 %	10%
6	Bab 6	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Oktober 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Iwan setiawan 10538293014

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200359766

File name: BAB_I_iwan.docx (26.34K)

Word count: 1710

Character count: 11650

Iwan setiawan 10538293014 BAB I

ORIGINALITY REPORT



9 % **10** % **4** % **3** %

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	kuswan.wordpress.com Internet Source	2%
3	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

Iwan setiawan 10538293014

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200360540

File name: BAB_II_iwan.docx (57.93K)

Word count: 3513

Character count: 23662

Iwan setiawan 10538293014 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24% **LULUS** **24%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	11%
2	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	5%
3	faisaljufri.blogspot.com Internet Source	3%
4	mkri.id Internet Source	3%
5	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Iwan setiawan 10538293014

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200361092

File name: BAB_III_iwan.docx (24.07K)

Word count: 1454

Character count: 9864

Iwan setiawan 10538293014 BAB III

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS	100%	12%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.uho.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	Hemy Kiswinarso, Muhammad Hanif. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2000-2015", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Publication	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Iwan setiawan 10538293014

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Oct-2023 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200361554

File name: BAB_IV_iwan.docx (525.24K)

Word count: 1942

Character count: 11708

Iwan setiawan 10538293014 BAB IV


ORIGINALITY REPORT



100% LULUS

100%	0%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
3	pdfcookie.com Internet Source	2%
4	www.desa-maria.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Iwan setiawan 10538293014

BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Oct-2023 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200362110

File name: BAB_V_iwan.docx (33.98K)

Word count: 3618

Character count: 24196

Iwan setiawan 10538293014 BAB V

ORIGINALITY REPORT

7 %		0 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.uho.ac.id Internet Source	2 %
2	es.scribd.com Internet Source	2 %
3	repository.unib.ac.id Internet Source	2 %
4	media.neliti.com Internet Source	2 %

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Iwan setiawan 10538293014

BAB VI

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Oct-2023 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200363014

File name: BAB_VI_iwan.docx (17.85K)

Word count: 374

Character count: 2425

Iwan setiawan 10538293014 BAB VI

ORIGINALITY REPORT

 4%	4%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

	1 eprints.kwikkiangje.ac.id Internet Source	4%
---	--	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3.muhammadiyah@plasma.com



Nomor : 222/05/C.4-VIII/X/40/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Safar 1441 H
01 October 2019 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Bupati Bima
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Bima

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1149/FKIP/A.II/IX/1441/2019 tanggal 30 September 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IWAN SETIAWAN
No. Stambuk : 10538 2930 14
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Perspektif Sosial dalam Pilkada di Kabupaten Bima"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Oktober 2019 s/d 8 Desember 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Bima, 11 Oktober 2019

Nomor : 070/353/003/X/2019
Lampiran : --
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bima
di-

Raba

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 222/05/C.4-VIII/X/40/2019, Tanggal 01 Oktober 2019. Perihal : Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **IWAN SETIAWAN**
NIM : 10538 2930 14
Program Study/Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul penelitian "**PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PILKADA DI KABUPATEN BIMA.**" dari tanggal 11 Oktober s/d 11 Desember 2019 yang berlokasi di **KABUPATEN BIMA.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian.

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BIMA
Kabid. Pengkajian Masalah Strategis dan
Penanganan Konflik,


MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.197905262006041016

TEMBUSAN : disampaikan kepada
Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 11 Oktober 2019

Nomor : 050.7/932/07.1/2019
 Lamp. : -
 Perihal : *Ijin Penelitian dan Survei*

Kepada
 Yth. 1. Ketua KPU Kab. Bima
 2. Kepala Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima
 Masing-masing

di -
 Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan KESBANG POLITIK An. Kabid Pengkajian Masalah Strategis & Penanganan Konflik Kab. Bima Nomor : 070/353/003/v/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survey kepada:

Nama : IWAN SETIAWAN
 Nim : 10538 2930 14
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Fakultas/ Jurusan : Pend. Sosiologi
 Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei
 Judul : Perspektif Sosial Dalam Pilkada Di Kab. Bima
 Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Bulan dari Tanggal 11 Oktober s/d 10 Desember 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima
 Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang


Ruvaidah, ST., MT
 NIP 1972021220022008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. BAWASLU Kab. Bima di Tempat
2. Camat Wera Kab. Bima di Tempat
3. Dekan Fakul. Keguruan & Ilmu Pendidikan Prog. Pend. Sosiologi Univ. Muhammadiyah Makassar di Tempat
4. Sdr. IWAN SETIAWAN Tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WERA**

Yn. Lintas Wera – Bima

Kode Pos. 84152

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN DAN SURVEY

Nomor : 050/ 842 /04.D.Pem/2019

Berdasarkan surat BAPPEDA Kabupaten Bima tanggal 11 Oktober 2019 Nomor : 050.7/932/07.1/2019 perihal Ijin Penelitian dan Survei, dengan ini kami memberikan Rekomendasi ijin penelitian kepada :

Nama : IWAN SETIAWAN
 NIM : 10538 2930 14
 Universitas : Muhammadiyah Makassar
 Fakultas/Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Survei
 Judul : Perspektif Sosial dalam Pilkada di Kab. Bima
 Lamanya : 2 (dua) bulan dari tanggal 11 Okt. s/d 10 Des. 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa kami berprinsip mendukung sepenuhnya dan memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Penelitian dan Survei dengan judul tersebut diatas.

Demikian rekomendasi penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawali, 15 Oktober 2019


 An. Camat Wera,
 Sekcam


H. ILHAM SH

Penata TK. I (III/d)
 NIP. 19671231 200604 1 193

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bima di Bima
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima di Raba
3. Yth. Dekan FKIP Prog. Pend. Sosiologi Univ. Muhammadiyah Makassar di Tempat
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bima di Panda
5. Yth. Kepala Desa Sangiang di Sangiang
6. Sdr. Iwan Setiawan di Tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WERA
KANTOR DESA SANGIANG**

Alamat : Jl. Pelabuhan Sangiang email : pesonasangiang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : Pem./17.2/602/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sangiang kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Menerangkan :

Nama : Iwan Setiawan
NIM : 10538293014
FAKULTAS : FKIP
Lembaga/Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada

Perspektif Sosial dalam Pilkada Desa Sangaing Kecamatan Wera Kabupaten Bima tanggal 11 Oktober s/d tanggal 14 November 2019, dengan judul Perspektif Sosial Dalam Pilkada Kabupaten Bima.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangiang, 16 November 2019
KEPALA DESA SANGIANG

A. RASID H. IMRAN, SE
NIP. 20190128 19687.7.1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : IWAN SETIAWAN
Stambuk : 10538 2930 14
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.
Judul Proposal : Perspektif Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima

Konsultansi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	19/10-19	- judulnya di-teliti dgn lebih ilera	
2.	20/10-19	- Paragraf masalahnya	
3.	4/11-19	- esensi	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM. 575 474



Terakreditasi Institusi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **IWAN SETIAWAN**
Stambuk : 10538 2930 14
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Lukman Ismail, S.Pd. M.Pd.**
Judul Proposal : **Perspektif Sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima**

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	15/8/19	beta Balakay	
	29/8/19	Kerja pustaka	
	2/9/19	Membeli Penelitian	
	5/9/19	Ace	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui,

Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.

NBM. 575 474



Terakreditasi Institusi

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : H. Uprin
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

2. Nama : Busman
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Staf Kaur Desa

3. Nama : Andi Irawan
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani

4. Nama : H. Jamaludin
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

5. Nama : Taofik
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani

6. Nama : Muliadin Hamza

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Tukang Batu

7. Nama : Syahril

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani

DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut bapak apakah demokrasi secara langsung di Desa sangiang berjalan sesuai aturan yang berlaku ?
2. Apakah pemerintah Desa Sangiang ikut serta dalam penyelenggara pemilukada yang berlangsung ?
3. Apakah perspektif masyarakat Desa Sangiang dalam berpartisipasi mensukseskan pemilukada ini ?
4. Menurut Perspektif bapak dinamika politik seperti apa yang terjadi di Desa Sangiang ?
5. Apa harapan bapak terhadap calon yang nanti akan menjadi kepala daerah ?
6. Apakah bapak menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang mampu membangun daerah ini ?
7. Apa yang bapak rasakan disaat proses mengikuti pilkada ini ?
8. Apakah ada konflik yang terjadi dalam dinamika politik di Desa Sangiang ?
9. Apakah bapak menggunakan hak pilih dalam pilkada ini ?

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama : H. Uprin Umur : 61 Tahun Pekerjaan : Wirausaha	1. Menurut bapak apakah demokrasi secara langsung di Desa Sangiang berjalan sesuai aturan yang berlaku ?	Kalo dilihat dari pengalaman sih apapun yang menjadi pilihan sesuai hati nurani masyarakat, itukan merupakan buah hasil pesta demokrasi yang secara langsung bagi masyarakat serta memberikan hak pilihnya sebagai warga negara yang ikut meramaikan dalam mensukseskan pilkada maupun memeriahkan kompetisi pilkada 1 kali selama 5 tahun.
		2. Apa yang bapak yang rasakan setelah mengikuti pilkada ini ?	Kami sebagai masyarakat termotivasi karena ada rasa keingintahuan serta keikutsertaan dalam pelaksanaan pilkada, kami juga merasakan langsung ikut terlibat dalam hal kesadaran politik seperti melihat sosok calon yang dianggap baik serta beramanah, dan lebih-lebih melihat visi dan misi para calon.
2	Nama : Busman Umur : 50 Tahun Pekerjaan : Staf Kaur Desa	1. Apakah pemerintah Desa Sangiang ikut serta dalam penyelenggara pemilukada berlangsung ?	Dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang lalu, pemerintah desa tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara pemilu tingkat desa juga berkantor di kantor desa setempat.

		2. Apakah ada konflik yang terjadi dalam dinamika politik di Desa Sangiang ?	Bermunculnya banyak perpecahan di antara masyarakat awam yang dipelintir oleh oknum atau sekelompok yang memiliki kepentingan, dalam artian masyarakat sering dijadikan korban, namun dalam sisi lain perpecahan hanya sebatas dinamika yang masih wajar ?
3	Nama : Andi Irawan Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Petani	1. Apakah perspektif masyarakat Desa Sangiang dalam berpartisipasi mensukseskan pemilukada ini ?	Masyarakat desa sangiang dalam hasil wawancara dengan informan menerangkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terkait pemilihan kepala daerah, karena kami ingin berpartisipasi atas dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain dari pada itu, ditinjau dari faktor pula sehingga sehingga kami masyarakat ikut berpartisipasi seperti halnya kesadaran politik, lokasi TPS, serta kartu pemilih.
4	Nama : H. Jamaludin Umur : 46 Tahun Pekerjaan : Wirausaha	1. Menurut perspektif bapak dinamika politik seperti apa yang terjadi di Desa Sangiang ?	Memang dinamika politik itu begitu kencang dan masyarakat selalu menjadi subjek politiknya. Politik juga merupakan suatu seni untuk melakukan segala kemungkinan. Maka tak heran, bila hari ini kawan besok menjadi lawan ataupun sebaliknya. Bila hari ini mendukung A, besok bisa jadi menolak. Namun politik juga harus beretika, etikanya adalah tetap berpihak kepada kebenaran. Jadi manuver dalam berpolitik memang sah-sah, karena politik juga sebuah seni. Seni untuk mempengaruhi dan menguasai serta mempertahankan kekuasaan.
5	Nama : Taofik	1. Apa harapan bapak terhadap calon yang	Ya, dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kami masyarakat mengharapkan

	Umur : 60 Tahun Pekerjaan : Petani	nanti akan menjadi kepala daerah ?	serta memiliki keinginan besar terhadap pasangan calon agar bisa membantu untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial.
6	Nama : Muliadin Hamza Umur : 58 Tahun Pekerjaan : Tukang batu	1. Apakah bapak menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang mampu membangun daerah ini ?	Ya, dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), kami masyarakat mengharapkan serta memiliki keinginan besar terhadap pasangan calon agar bisa membantu untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sosial.
7	Nama : Syahril Umur : 37 Tahun Pekerjaan : Petani	1. Apakah bapak menggunakan hak pilih dalam pilkada ini ?	Sepengetahuan saya, kondisi sosial masyarakat itu sering kali terjadi karena kesibukan kegiatan pribadinya, kami juga kadang lebih memilih mengurus kegiatan sendiri ketimbang urusan pemilih sebab, urusan politik kadang yang berhak dan di istimewa hanya orang-orang kaya ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

DOKUMENTASI



Gambar : Hasil Observasi Lokasi Kantor Desa Sangiang



Gambar : Posko Central Comando Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Operator Desa Sangiang



Gambar : Foto Bersama Ketua Karan Taruna Desa sangiang



Gambar : Duduk Bersama Dengan Para Pemuda Desa Sangiang



RIWAYAT HIDUP



Iwan Setiawan. Lahir di Desa Sangiang, pada tanggal 03 Juli 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bapak H. Jamaludin dan Ibu Nurma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sangiang mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Wera dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Wera dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 penulis berhasil lulus pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan. Selama masa pendidikan penulis mengikuti beberapa organisasi eksternal dan pertama kali ikut sejak 2014 yaitu organisasi Gerakan Mahasiswa Sangiang (GERMAS) Bima-Makassar dan pernah menjabat sebagai (Ketua Umum Periode 2016-2017), Himpunan Mahasiswa Wera (HMW) Bima-Makassar (Dewan Penasehat Lembaga 2017-2018), Gerakan Aktivistis Mahasiswa (GAM) Mantan Pengurus Pusat Periode 2016-2017. Dan alhamdulillah sekarang ini telah berhasil menyusun tugas akhir dengan judul; “PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PILKADA DI KABUPATEN BIMA”